



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional serta rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali;
 - b. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks modal manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan RPJPD Provinsi Bali.
- (2) Arah Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang serta berpedoman dengan RTRW yang merupakan satu kesatuan sistem Pembangunan Daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Desember 2024



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:
(5,67/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1. Tujuan.....	I-8
2. Sasaran	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	I-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
1. Aspek Geografi.....	II-1
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung	II-1
B. Tofografi dan Kemiringan Lereng.....	II-5
C. Geologi dan Jenis Tanah	II-8
D. Iklim	II-11
E. Karakteristik Ekoregion	II-17
F. Pola Penggunaan Lahan	II-27
G. Persentase Alih Fungsi Lahan.....	II-32
H. Hidrologi	II-32
I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-40
J. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	II-41
K. Indeks Resiko Bencana.....	II-48
L. Indeks Ketahanan Pangan	II-49
2. Aspek Demografi.....	II-50
A. Jumlah, Sebaran dan Komposisi Penduduk.....	II-50
B. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-52
C. Rasio Ketergantungan Umur	II-52
D. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	II-53
E. Status Pekerjaan Penduduk	II-54

2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-56
1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-56
	A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-56
	B. Indeks Gini/Gini Rasio.....	II-56
	C. Kemiskinan.....	II-59
	D. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-61
	E. Indeks Pembangunan Manusia	II-64
2.	Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-66
	A. Indeks Keluarga Sehat.....	II-66
	B. Indeks Perlindungan Anak	II-66
	C. Kesenjangan Gender	II-68
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-72
1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-73
	A. Distribusi PDRB Kabupaten Badung Berdasarkan Lapangan Usaha	II-73
	B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	II-75
2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-76
	A. Angka Partisipasi Sekolah	II-76
	B. Rata-rata Lama Sekolah	II-77
	C. Harapan Lama Sekolah	II-77
	D. Angka Literasi dan Numerisasi.....	II-78
	E. Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja	II-79
3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-81
	A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.....	II-81
	B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-82
	C. Rasio Jaringan Irigasi.....	II-83
	D. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	II-85
	E. Indeks Kualitas Air.....	II-86
2.4	Aspek Pelayan Umum.....	II-89
1.	Indeks Pelayanan Publik.....	II-89
2.	Indeks Inovasi Daerah.....	II-90
3.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	II-92
4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-93
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-96
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II-97
1.	Proyeksi Penduduk	II-97
	A. Proyeksi Jumlah Penduduk	II-97
	B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-98
	C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	II-99
2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-100
	A. Proyeksi Kebutuhan Rumah.....	II-100
	B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.....	II-101
	C. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik.....	II-102
	D. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah	II-103
	E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	II-104
	F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan.....	II-105

2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-107
1.	Sistem Pusat Permukiman	II-107
2.	Pola Ruang Wilayah	II-108
3.	Kawasan Strategis Kabupaten	II-111
BAB 3	PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS	
3.1	Permasalahan Pembangunan	III-1
3.2	Isu-isu Strategis Pembangunan	III-8
BAB 4	VISI & MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045	
4.1	Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	IV-1
4.2	Misi Pembangunan Jangka Panjang	IV-12
BAB 5	ARAHAN KEBIJAKAN & SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	
5.1	Arah Kebijakan	V-1
5.2	Sasaran Pokok Pembangunan	V-5
5.3	Pentahapan Pembangunan	V-49
BAB 6	PENUTUP	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung	II-1
Tabel 2.2	Curah Hujan Tahunan, 2015-2023.....	II-12
Tabel 2.3	Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 (mm).....	II-12
Tabel 2.4	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023.....	II-13
Tabel 2.5	Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)	II-14
Tabel 2.6	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan 2015-2023 (%)	II-16
Tabel 2.7	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)	II-16
Tabel 2.8	Distribusi Ekoregion Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung	II-21
Tabel 2.9	Distribusi Tipe Vegetasi Alami Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung	II-24
Tabel 2.10	Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018, 2020 dan 2022.....	II-27
Tabel 2.11	Mata Air dan Luas Area yang Dialiri di Kabupaten Badung	II-35
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.13	Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Badung.....	II-42
Tabel 2.14	Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Masing-Masing Desa	II-43
Tabel 2.15	Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung.....	II-46
Tabel 2.16	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali.....	II-48
Tabel 2.17	Defisit Air di Provinsi Bali.....	II-48
Tabel 2.18	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	II-49
Tabel 2.19	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali.....	II-50
Tabel 2.20	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung	II-51
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Badung	II-52
Tabel 2.22	Rasio Ketergantungan Umur, Anak dan Usia Lanjut di Kabupaten Badung Tahun 2010, 2020 dan 2022.....	II-53
Tabel 2.23	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	II-54
Tabel 2.24	Komposisi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.25	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2023	II-58
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023	II-60
Tabel 2.27	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023	II-61
Tabel 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-63
Tabel 2.29	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2023.....	II-65
Tabel 2.30	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022	II-66
Tabel 2.31	Pembobotan Klaster Indeks Perlindungan Anak	II-67
Tabel 2.32	Indeks Klaster I-V menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021	II-68
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-69
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-69

Tabel 2.34	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-70
Tabel 2.35	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-72
Tabel 2.36	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Badung Tahun 2018-2023.....	II-74
Tabel 2.37	Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Badung Tahun 2018-2023.....	II-75
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung tahun 2019-2023.....	II-77
Tabel 2.39	Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung 2021-2023.....	II-77
Tabel 2.40	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	II-78
Tabel 2.41	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP SMA di Provinsi Bali.....	II-79
Tabel 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-80
Tabel 2.43	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-81
Tabel 2.44	Proporsi Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 ..	II-81
Tabel 2.45	Presentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-82
Tabel 2.46	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.47	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 ...	II-85
Tabel 2.48	Nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Badung Tahun 2022	II-88
Tabel 2.49	Status Mutu Air Sungai Di Kabupaten Tahun 2022	II-88
Tabel 2.50	Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2022.....	II-89
Tabel 2.51	Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali Per Kabupaten Tahun 2022.....	II-91
Tabel 2.52	Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Bali Tahun 2023.....	II-92
Tabel 2.53	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	II-95
Tabel 2.54	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Tahun 1961-2020.....	II-97
Tabel 2.55	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-97
Tabel 2.56	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045... ..	II-98
Tabel 2.57	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045. ..	II-99
Tabel 2.58	Hasil Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-100
Tabel 2.59	Hasil Proyeksi Kebutuhan Lahan Perumahan di Kabupaten Badung.....	II-101
Tabel 2.60	Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-101
Tabel 2.61	Hasil Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-102
Tabel 2.62	Hasil Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-103
Tabel 2.63	Hasil Proyeksi Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	II-105
Tabel 2.64	Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Badung	II-105
Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Badung.....	III-1
Tabel 3.2	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung	III-8
Tabel 4.1	Rincian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	IV-4
Tabel 4.2	Keselarasn Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Terhadap Provinsi Bali dan Nasional.....	IV-8
Tabel 4.3	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045	IV-10
Tabel 4.4	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	IV-11

Tabel 4.5	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Misi RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN	IV-20
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	V-5
Tabel 5.3	Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Arah (Tujuan) Pembangunan Provinsi Bali.....	V-6
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045	V-8
Tabel 5.5	Keselarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan, dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045	V-13
Tabel 5.6	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 terhadap RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045.....	V-18
Tabel 5.7	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung.....	V-33
Tabel 5.8	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	V-40
Tabel 5.9	Penyelarasan <i>Game Changer</i> RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	V-44
Tabel 5.10	Target Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	V-49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-5
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung	II-4
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Badung	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Badung	II-7
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Badung.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung.....	II-10
Gambar 2.6	Curah Hujan Tahunan, 2015-2023.....	II-12
Gambar 2.7	Curah Hujan Bulanan Tahun 2023.....	II-13
Gambar 2.8	Grafik Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023	II-14
Gambar 2.9	Grafik Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)	II-15
Gambar 2.10	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%).....	II-16
Gambar 2.11	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%).....	II-16
Gambar 2.12	Peta Ekoregion Pulau Bali di Kabupaten Badung.....	II-22
Gambar 2.13	Peta Vegetasi Alami Pulau Bali di Kabupaten Badung	II-26
Gambar 2.14	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018.....	II-29
Gambar 2.15	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2020.....	II-30
Gambar 2.16	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2022.....	II-31
Gambar 2.17	Peta Sungai di Kabupaten Badung	II-36
Gambar 2.18	Peta Aquifer Air Tanah di Kabupaten Badung	II-39
Gambar 2.19	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur 2023.....	II-52
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2013-2023	II-56
Gambar 2.21	Grafik Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Provinsi Bali	II-58
Gambar 2.22	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023.....	II-60
Gambar 2.23	Diagram Perbandingan Angka Kemiskinan di Kabupaten Badung dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-61
Gambar 2.24	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-63
Gambar 2.25	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, dan Provinsi Bali Tahun 2012-2023.....	II-65
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-69
Gambar 2.27	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Badung Dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-82
Gambar 2.28	Grafik Perbandingan Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-71
Gambar 2.29	Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2.30	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sumber Bersih Perpipaian Di Kabupaten Badung .	II-86
Gambar 2.31	Grafik Perbandingan Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2023	II-90



Gambar 2.32 Grafik Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022	II-91
Gambar 2.33 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023	II-95
Gambar 2.34 Peta Struktur Ruang Kabupaten Badung	II-113
Gambar 2.35 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung.....	II-114
Gambar 2.36 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung	II-115

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

URAIAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan tahap penting dalam proses pembangunan karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengelola berbagai aktivitas pembangunan. Secara umum perencanaan memberikan arah pembangunan yang jelas dan terukur sehingga dapat mengelola alokasi sumber daya secara efektif dan efisien, menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan khususnya pada pemerintahan yang sifatnya berjenjang, sekaligus kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan cenderung menjadi tidak terarah dan tidak efisien, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang baik sesuai dengan jenjang pemerintahan (pusat-daerah) maupun sesuai dengan jenjang periodisasi waktu (pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan). Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dalam sistem sistem perencanaan pembangunan provinsi serta nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah di samping telah diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Dalam dokumen ini memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah



jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan dokumen RPJPD merupakan kewajiban yang diamanatkan kepada pemerintah daerah karena ada sanksi yang dikenakan apabila tidak dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah turut disebutkan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan mengenai penyusunan RPJPD secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa dalam proses penyusunan RPJPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (ranwal) RPJPD yang disusun paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD sebelumnya berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Kabupaten Badung memiliki RPJPD Tahun 2005-2025 yang akan segera berakhir implementasinya dalam waktu dekat. Berkenaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025, maka Pemerintah Kabupaten Badung yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Badung berkewajiban menyiapkan dokumen RPJPD untuk periode berikutnya yaitu Tahun 2025-2045 di Tahun 2024 ini.

1.2. DASAR HUKUM

Kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/367/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 5-110);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Badung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagaimana Amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung yang berkeadilan dengan menempatkan *Krama* Badung sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Secara khusus, dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ini Pemerintah Kabupaten Badung mengedepankan terwujudnya kesejahteraan *Krama* Badung yang berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan yaitu:

1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
2. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas daerah;
4. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
5. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Fokus pembangunan di atas akan disertai dengan kinerja yang ingin dicapai dan sejumlah indikator makro yang bersifat progresif. Kinerja dan indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

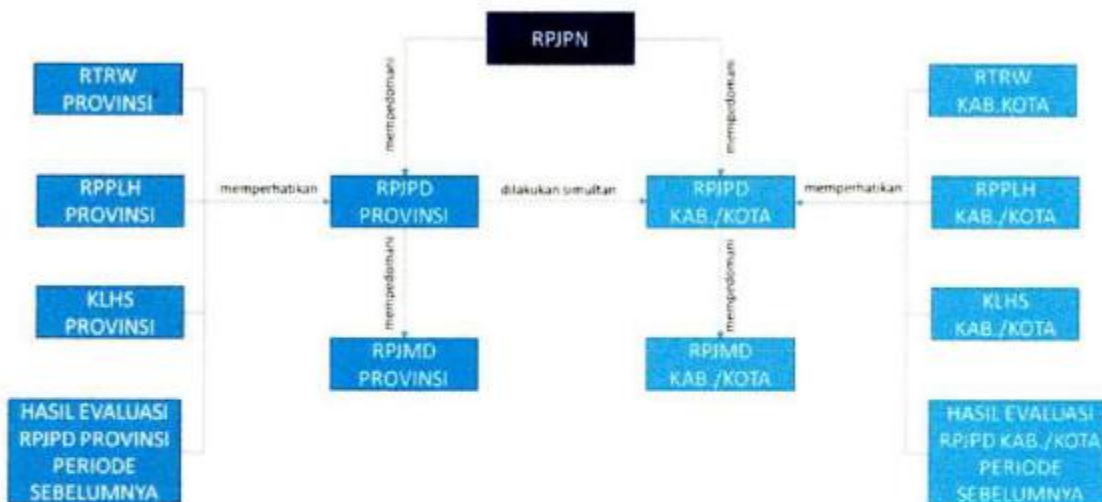
1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan dokumen perencanaan yang harus disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan antar dokumen itu sendiri serta terkait antar pemerintahan. Terkait konteks integrasi antar dokumen perencanaan

pembangunan ini, hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025- 2045 adalah:

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung periode sebelumnya (2005-2025) dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.
5. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2023-2043. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.3.2. Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten Badung terhadap Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 di samping merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan Provinsi Bali sebagaimana yang dicita-citakan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023). Secara spesifik diamanatkan bahwa Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dijadikan landasan penyusunan Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali (termasuk Kabupaten Badung). Haluan Pembangunan Bali ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana atau sebutan lainnya, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten se-Bali (termasuk Kabupaten Badung), dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, merupakan arah dan strategi untuk memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali; bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis. Kabupaten Badung merupakan bagian dari kesatuan wilayah Bali sehingga dalam penetapan visi dan misi pembangunan jangka panjang harus merujuk pada arah dan strategi dalam pemuliaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali tersebut. Adapun pemuliaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang harus dirujuk dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah sebagai berikut:

1. Alam Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Alam diciptakan oleh *Hyang* Maha Kuasa sebagai tempat dan sumber kehidupan makhluk; Manusia, hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Manusia adalah Alam itu sendiri, Manusia harus harmonis dengan Alam, Alam ibarat orang tua, hidup harus menghormati Alam. Karena Alam selalu memberi kehidupan Manusia, tetapi Alam tidak pernah menuntut apa pun kepada Manusia. Oleh karena itu, Manusia wajib hukumnya menjaga Alam dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala* yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Guna mewujudkan pelestarian alam secara sekala dan niskala tersebut, maka upaya yang dilaksanakan dalam konteks implementasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kesucian dan kemuliaan Alam secara *Niskala* dengan terus melaksanakan secara aktif berbagai Upakara dan Upacara berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal, sebagai pelaksanaan *Sad Kerthi*.
- b) Menjaga semua kawasan dan tempat suci di seluruh wilayah Kabupaten Badung.
- c) Menjaga kelestarian dan keutuhan Upakara dan Upacara berpedoman pada *Catur Bandana Yadnya* atau 4 (empat) Pilar Pelaksanaan Upacara, yaitu: *Tantra* (kekuatan geometrik Alam semesta); *Yantra* (energi simbol Alam semesta); *Mudra* (tarian kosmik Alam semesta); dan *Mantra* (*sabdha* Alam semesta).

- d) Secara terus-menerus menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Alam secara *Niskala*.
- e) Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem, seperti ekosistem daratan, laut, dan pesisir dari berbagai bencana Alam dan dampak negatif pembangunan.
- f) Pemanfaatan Alam beserta isinya secara bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanpa merusak dan mengeksploitasi Alam.

2. Manusia Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Secara historis dan sosiologis Manusia Bali masuk dalam kategori Manusia unggul. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul harus menjadi prioritas utama pembangunan Bali 100 Tahun ke depan. Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi, serta memiliki daya saing tinggi (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*) dalam menghadapi dinamika persaingan nasional dan internasional. Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan kualitas SDM paling unggul dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan oleh data IPM Kabupaten Badung yang selalu lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sejalan dengan itu maka peningkatan dan pengembangan SDM Badung untuk selalu unggul akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang.

Dalam mewujudkan SDM Badung yang unggul tersebut, dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru diamanatkan upaya yang wajib untuk diambil Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan udara bersih untuk Badung di masa depan
- b) Menyediakan air bersih untuk Badung di masa depan
- c) Menciptakan kedaulatan pangan dengan pangan organik untuk Badung di masa depan
- d) Mewujudkan ketercukupan sandang dan papan untuk Badung di masa depan
- e) Membangun pendidikan masa depan
- f) Membangun kesehatan dan jaminan sosial untuk Badung di masa depan
- g) Menjaga ketertiban daerah untuk Badung di masa depan
- h) Mengoptimalkan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi masa depan
- i) Memajukan *Usadha* Bali
- j) Mengelola dan mengatur perkembangan penduduk Badung masa depan
- k) Meningkatkan SDM Badung yang memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi
- l) Menciptakan tenaga kerja Badung masa depan yang kompeten, berintegritas, profesional, dan berdaya saing
- m) Mendorong kemandirian energi Badung di masa depan
- n) Melaksanakan Transformasi Perekonomian Bali : Ekonomi *Kerthi* Bali (Sektor Pertanian; Sektor Kelautan; Sektor Industri; Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Sektor Pariwisata)
- o) Mengembangkan Industri manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali
- p) Mendorong kebanggaan dalam menggunakan produk lokal Badung
- q) Mengembangkan Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat

- r) Menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan di Kabupaten Badung
- s) Mengembangkan infrastruktur dan transportasi berkualitas untuk Badung masa depan

3. Kebudayaan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Secara empiris, perjalanan panjang Kebudayaan Bali selama berabad-abad masih eksis dan kuat sampai masa kini. Eksistensi dan kekuatan Kebudayaan Bali dibuktikan ketika terus menerus mengalami berbagai gempuran secara internal dan eksternal, seperti munculnya industri pariwisata sejak tahun 1930-an, 93 tahun lalu (hampir satu abad); pengaruh budaya dan ideologi asing; derasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta faktor lainnya.

Kebijakan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang menjadi amanat dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru adalah sebagai berikut:

- a) Pemuliaan Desa Adat
- b) Pemuliaan Subak
- c) Pemuliaan Manuskrip Kearifan Lokal Bali
- d) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*)
- e) Penguatan dan Pemajuan Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali
- f) Pelindungan Hukum Karya Cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI)

Keseluruhan upaya pelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali tersebut akan terangkum dalam Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan yang lebih operasional. Sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini dipastikan akan selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru serta menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pemuliaan manusia, alam, dan budaya Bali di Kabupaten Badung.

1.4. MAKSUD & TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah melaksanakan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menciptakan pembangunan nasional dan daerah yang sinergis, terarah, dan berkelanjutan.


1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah untuk menyediakan rencana pembangunan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebagai arah pembangunan jangka panjang yang terukur, menetapkan prioritas pembangunan, efisiensi alokasi sumber daya daerah, sinergitas antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan, serta kesinambungan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- **Bab 1 Pendahuluan**
Memuat setidaknya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.
- **Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Bab ini memuat mengenai kondisi wilayah Kabupaten Badung yang akan dilihat berdasarkan:
 1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Geografi
Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
 - b. Demografi
Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
 3. Aspek Daya Saing
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b. Daya Saing SDM
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - d. Daya Saing Iklim Investasi
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
 4. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
 5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2045
Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2045 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

- 
6. **Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**
Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana ini memuat:
 - a. Analisis Proyeksi Penduduk
 - b. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 7. **Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045;**
Memuat mengenai penjelasan terkait pusat-pusat pertumbuhan wilayah sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Badung dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

- **Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab ini memuat mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Badung yang dapat mempengaruhi perkembangannya di masa yang akan datang. Permasalahan dan Isu Strategis dalam Bab ini disesuaikan dengan isu strategis yang termuat dalam Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Badung.

- **Bab 4 Visi dan Misi Daerah;**

Bab ini memuat mengenai kondisi yang diharapkan dapat terwujud di Kabupaten Badung hingga 20 tahun mendatang yang ditetapkan dalam wujud visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam misi-misi pembangunan daerah.

- **Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;**

Bab ini memuat mengenai:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2044

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

- **Bab 6 Penutup**

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Badung.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

A. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

Kabupaten Badung terletak pada belahan bagian tengah Pulau Bali membujur dari tengah ke selatan pada posisi 8° 14'20"- 8° 50'48" LS dan 115° 05' 00" - 115° 26' 16" BT. Secara administrasi Kabupaten Badung, terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan, yang terdiri atas Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 39.842,48 Ha atau 7,43 persen dari luas Pulau Bali dan merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Luas wilayah Kabupaten Badung adalah 39.842,48 Ha. Ibukota Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Mangupura, meliputi Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Sading, Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani dan Desa Kekeran. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Badung yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Barat : Samudra Hindia dan Wilayah Kabupaten Tabanan

Untuk luasan masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
1	Kecamatan Abiansemal		6.616,88	16,61%
		Desa Abiansemal	452,04	
		Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	272,85	
		Desa Angantaka	225,04	
		Desa Ayunan	206,15	
		Desa Blahkiuh	463,59	
		Desa Bongkasa	412,27	
		Desa Bongkasa Pertiwi	243,31	
		Desa Darmasaba	594,01	
		Desa Jagapati	172,99	
		Desa Mambal	340,46	
		Desa Mekar Bhuwana	299,59	
		Desa Punggul	236,71	
		Desa Sangeh	483,77	
		Desa Sedang	367,87	
		Desa Selat	184,50	

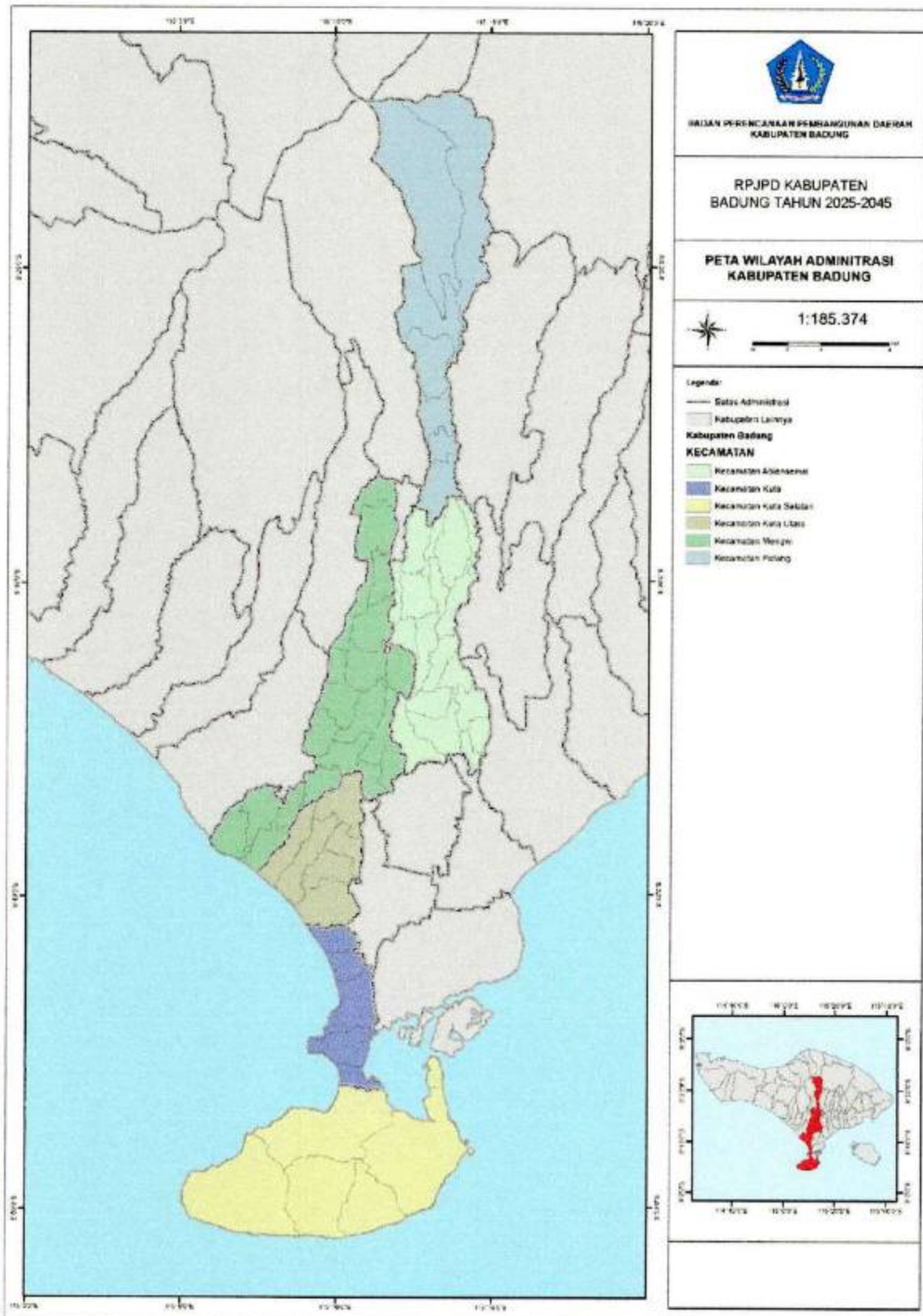
No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
		Desa Sibang Gede	587,47	
		Desa Sibang Kaja	360,23	
		Desa Taman	714,04	
2	Kecamatan Kuta		2.223,44	5,58%
		Kelurahan Kedonganan	226,03	
		Kelurahan Kuta	785,46	
		Kelurahan Legian	304,35	
		Kelurahan Seminyak	346,88	
		Kelurahan Tuban	560,73	
3	Kecamatan Kuta Selatan		10.111,96	25,38%
		Desa Kutuh	997,62	
		Desa Pecatu	2.569,67	
		Desa Ungasan	1.582,48	
		Kelurahan Benoa	2.563,80	
		Kelurahan Jimbaran	2.268,13	
		Kelurahan Tanjung Benoa	130,25	
4	Kecamatan Kuta Utara		3.493,01	8,77%
		Desa Canggu	565,26	
		Desa Dalung	682,24	
		Desa Tibebeneng	661,45	
		Kelurahan Kerobokan	442,79	
		Kelurahan Kerobokan Kaja	357,99	
		Kelurahan Kerobokan Kelod	783,28	
5	Kecamatan Mengwi		8.163,49	20,49%
		Desa Baha	552,25	
		Desa Buduk	326,03	
		Desa Cemagi	484,70	
		Desa Gulingan	527,91	
		Desa Kekeran	403,68	
		Desa Kuwum	343,85	
		Desa Mengwi	216,83	
		Desa Mengwitani	458,51	
		Desa Munggu	542,03	
		Desa Pendarungan	409,98	
		Desa Pererenan	386,17	
		Desa Sembung	632,82	
		Desa Sobangan	340,86	
		Desa Tumbakbayuh	267,16	
		Desa Werdi Bhuwana	344,61	
		Kelurahan Abianbase	410,06	
		Kelurahan Kapal	549,50	
		Kelurahan Lukluk	407,99	
		Kelurahan Sading	296,09	
		Kelurahan Sempidi	262,46	
6	Kecamatan Petang		9.233,70	23,18%
		Desa Belok Sidan	2.683,25	
		Desa Carangsari	606,54	
		Desa Getasan	266,39	
		Desa Pangsan	442,13	
		Desa Pelaga	3.386,68	
		Desa Petang	759,81	
		Desa Sulangai	1.088,92	

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
Kabupaten Badung			39.842,48	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Badung

Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi paling tinggi yaitu 10.111,96 Ha atau 25,38% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Kecamatan Kuta Selatan dikenal karena pantai-pantai indah yang menjadi tujuan wisata populer, seperti Pantai Kuta, Pantai Dreamland, dan Pantai Pandawa. Selain itu, Kecamatan Kuta Selatan juga memiliki beberapa bukit dan perbukitan kecil yang menambah keindahan pemandangan alamnya. Sedangkan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil yaitu 22,23 Km² atau 5,58% dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

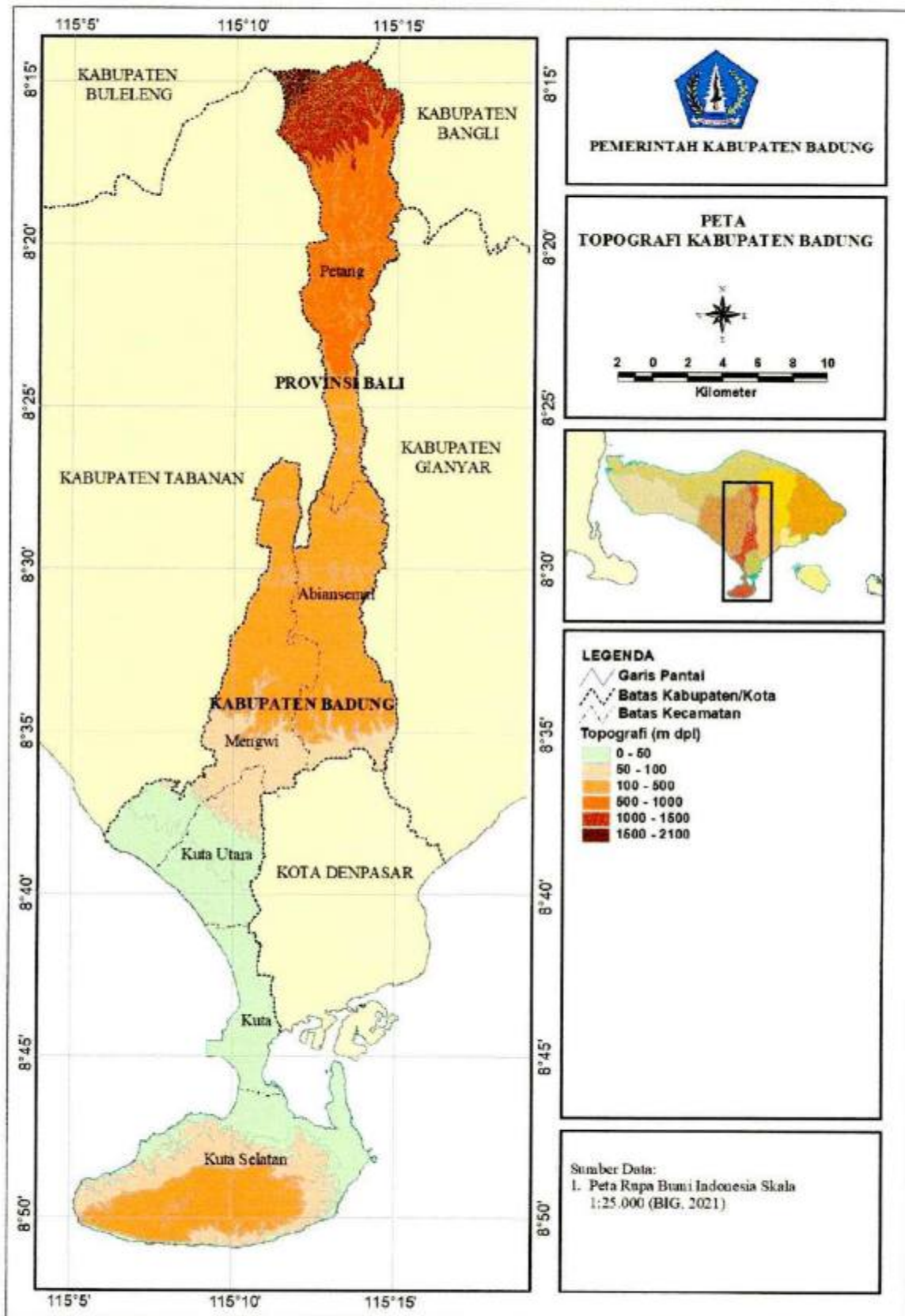


B. Topografi dan Kemiringan Lereng

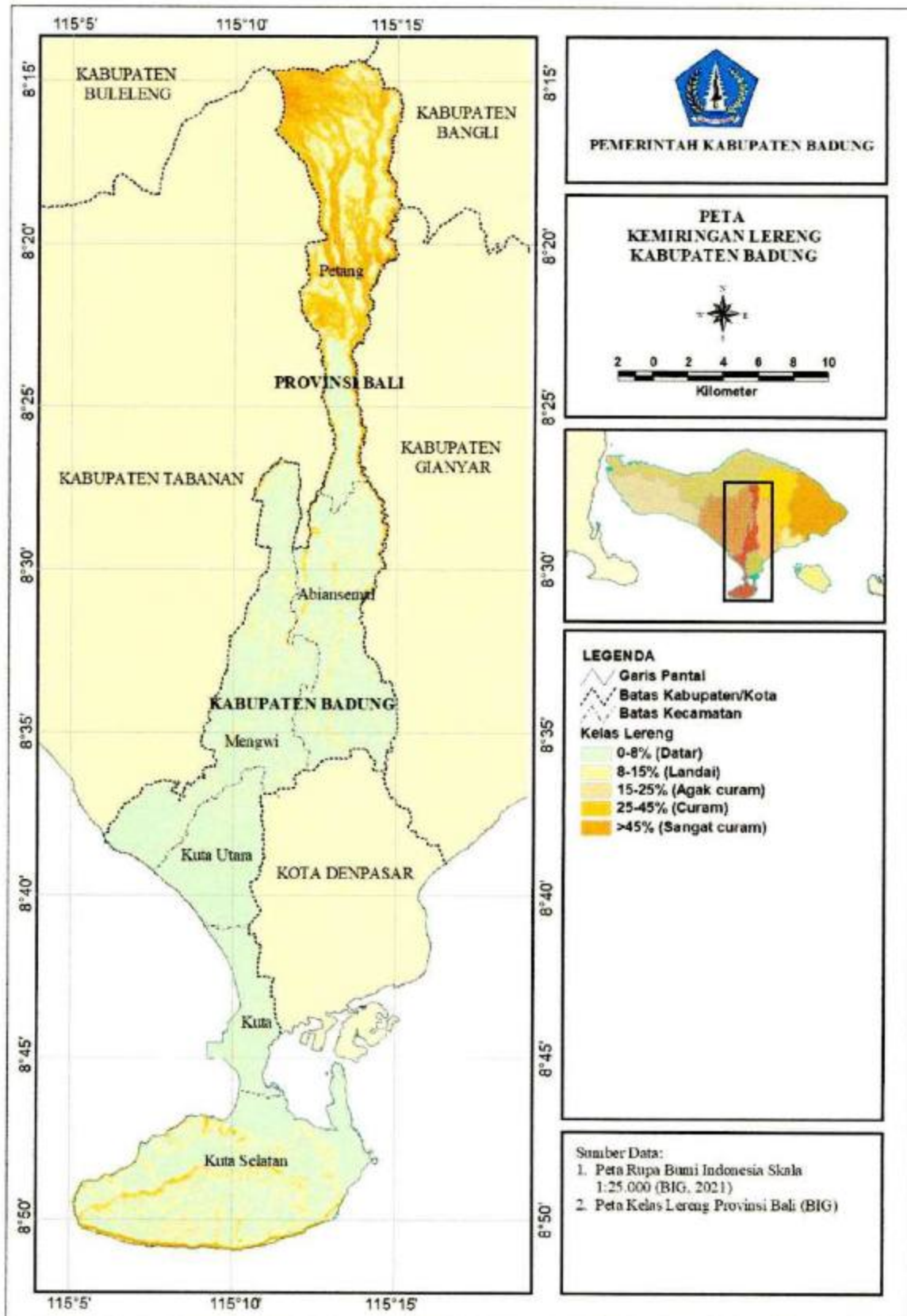
Wilayah Kabupaten Badung terletak pada ketinggian 0-2.075 mdpl (meter dari permukaan laut) dengan topografi yang beragam dimana dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu wilayah dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Wilayah Kecamatan Kuta Selatan berada pada ketinggian 0 – 215 mdpl, lebih banyak daerah perbukitan. Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, dan Abiansemal termasuk daerah dataran rendah. Kecamatan Kuta terletak pada ketinggian 0 – 27 mdpl, Kuta Utara pada ketinggian 0 – 65 mdpl, Mengwi pada ketinggian 0 – 350 mdpl, dan Abiansemal pada ketinggian 75 - 350 mdpl. Sedangkan Kecamatan Petang tergolong daerah dataran tinggi, berada pada ketinggian 275 – 2075 mdpl.

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Badung berkisar antara datar sampai agak terjal. Wilayah yang merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 – 2% terdapat di wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal lebih banyak lahan datar dan landai dengan kemiringan 0 – 2% dan 2 – 15%. Sedangkan wilayah Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Petang lebih banyak lahan dengan kemiringan lereng 15 – 40% yang merupakan daerah relatif terjal.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Badung



Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Badung



C. Geologi dan Jenis Tanah

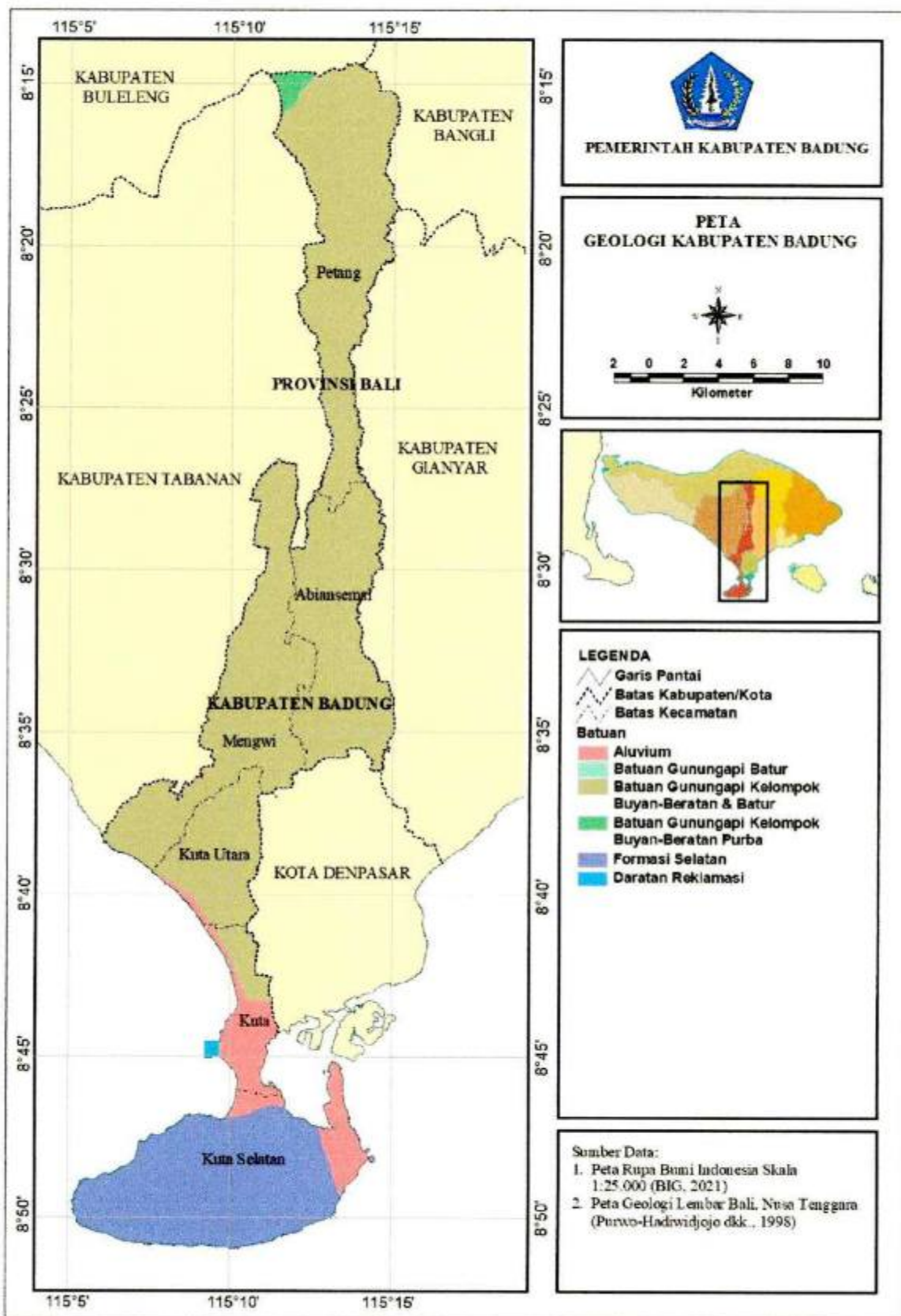
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk., 1998), struktur geologi regional Pulau Bali pada umumnya dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama Miosin Bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk Formasi Selatan. Sebaran formasi geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a. Batuan Gunungapi Kelompok Buyan-Beratan dan Batur, terbentuk pada kala Kwarter, terdiri atas breksi gunung api dan lava, setempat tuf. Batuan ini sebarannya sangat luas di Kabupaten Badung, meliputi Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang.
- b. Endapan Aluvium, berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung, sebagai endapan sungai dan pantai. Batuan ini terdapat di Nusa Dua, Tanjung Benoa, Jimbaran, Kedonganan, Tuban, dan Kuta.
- c. Formasi Selatan, terbentuk pada kala Miosin, terdiri atas batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah bukit Kecamatan Kuta Selatan.

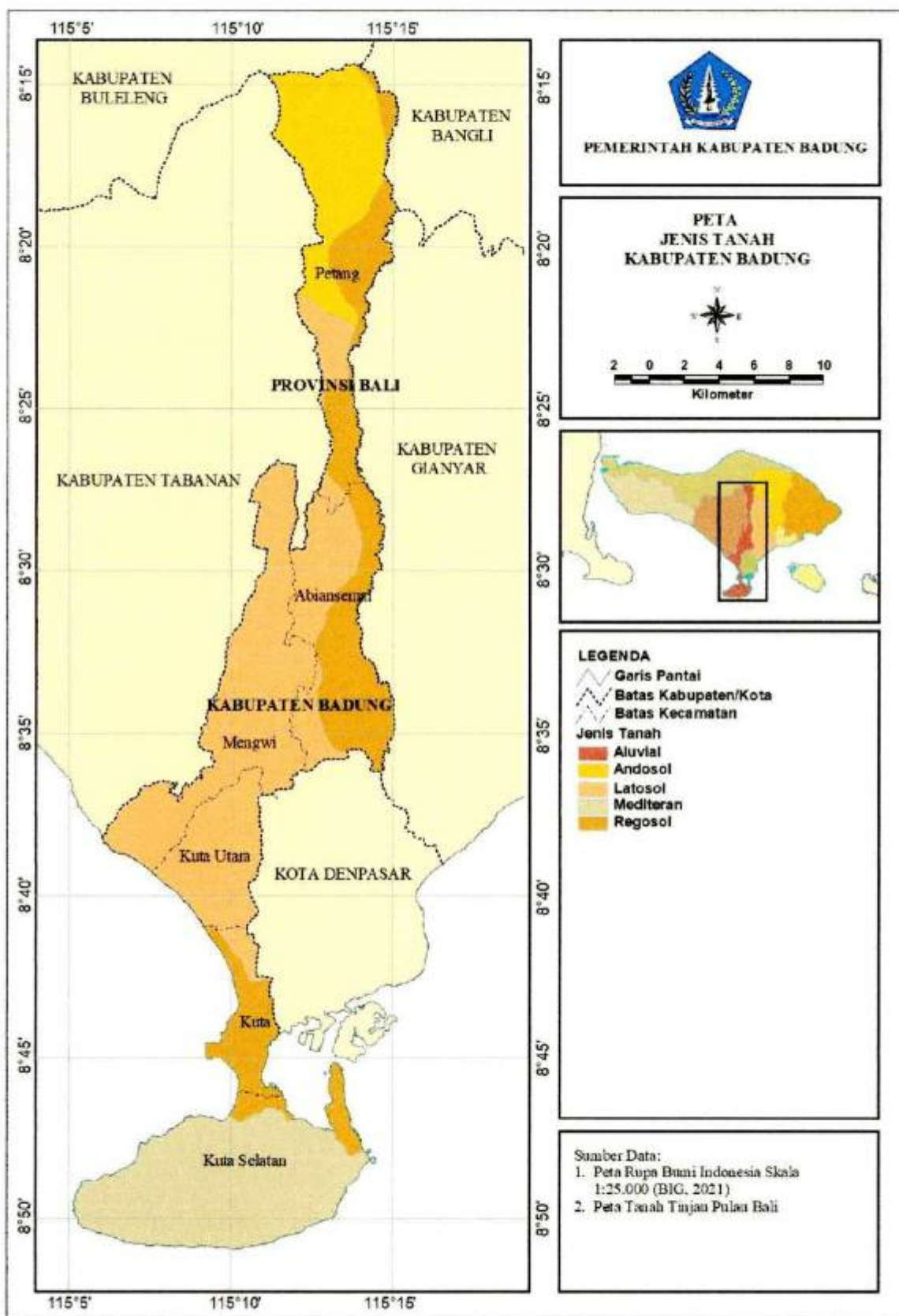
Ada empat jenis tanah utama yang tersebar di wilayah Kabupaten Badung menurut Peta Tanah Tinjau Bali (1970). Keempat jenis tanah tersebut, yaitu:

- a. Regosol, terdiri atas Regosol Coklat Kelabu, Regosol Kelabu, Regosol Coklat dan Regosol Berhumus. Jenis tanah ini berbahan induk endapan laut, abu volkan dan intermedier, serta dengan fisiografi beting pantai dan dengan bentukan melandai. Tersebar di Kuta, Tuban, Kedongan, daerah dekat pantai Seminyak dan Legian, daerah dataran rendah Jimbaran, Tanjung Benoa, Nusa Dua, dan daerah bagian timur Kecamatan Abiansemal dan Petang.
- b. Latosol, terdiri atas Latosol Coklat Kekuningan, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan dan Litosol. Jenis tanah ini berbahan induk abu dan tufa volkan, dengan fisiografi lungur volkan kerucut dan lungur volkan serta bentukan melandai sampai bergelombang. Jenis tanah ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang bagian barat.
- c. Mediteran, terdiri atas Mediteran Coklat dan Mediteran Coklat Merah. Jenis tanah ini berbahan induk batu kapur karang dan batu gamping dengan fisiografi pantai berkarang dan bukit angkatan. Tersebar di daerah perbukitan Kecamatan Kuta Selatan.
- d. Andosol, berbahan induk abu dan tufa volkan, terdapat di Kecamatan Petang.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Badung



Gambar 2.5.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung



D. Iklim

1) Tipe dan Kondisi Iklim

Wilayah Kabupaten Badung termasuk ke dalam daerah monsun yang ditandai dengan pergantian arah angin sekitar enam bulan sekali. Pada musim Barat (Oktober - Maret), cuaca dipengaruhi oleh angin Barat, baik yang melalui Laut Jawa (disebut Monsun Pasifik), maupun yang melalui Samudra Hindia. Dua samudera ini mempengaruhi karakteristik curah hujan, dengan pengaruh angin monsun Barat Samudra Hindia dominan di sebelah Selatan, dan Monsun Pasifik di sebelah Utara. Monsun barat umumnya menimbulkan banyak hujan yang terjadi sekitar bulan Januari, monsun timur umumnya menyebabkan kondisi kurang hujan (kemarau) yang terjadi sekitar bulan Agustus (Sofian et al., 2008).

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Badung mempunyai sebaran tipe iklim C, D, E dan F. Tipe iklim C adalah perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 33,3 – 60,0%, terdapat di Kecamatan Mengwi bagian utara, seluruh Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Petang. Wilayah dengan tipe iklim D yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 60,0 – 100% terdapat di Kecamatan Mengwi dekat pantai dan Kuta Utara. Wilayah dengan tipe iklim E yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 100 -167% terdapat di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta. Sedangkan tipe iklim F yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 167 – 300% terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

2) Curah Hujan

Pengaruh tingginya suhu permukaan laut (SPL) di Samudera Hindia mendorong intensifnya evaporasi dan pembentukan awan pada musim angin Barat sehingga mendorong terjadinya curah hujan yang tinggi pada bulan November sampai Maret. Sebaliknya pada musim angin Timur, SPL di Samudera Hindia menurun dan mencapai suhu terendah pada bulan Agustus, menyebabkan terjadinya musim kering dengan curah hujan yang sangat rendah.

Curah hujan tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2022 berkisar 997 – 2.993 mm. Curah hujan relatif tinggi (di atas 2.000 mm) terjadi pada tahun 2016, 2017, 2021 dan 2022. Sedangkan curah hujan terendah selama periode tersebut terjadi pada tahun 2019.

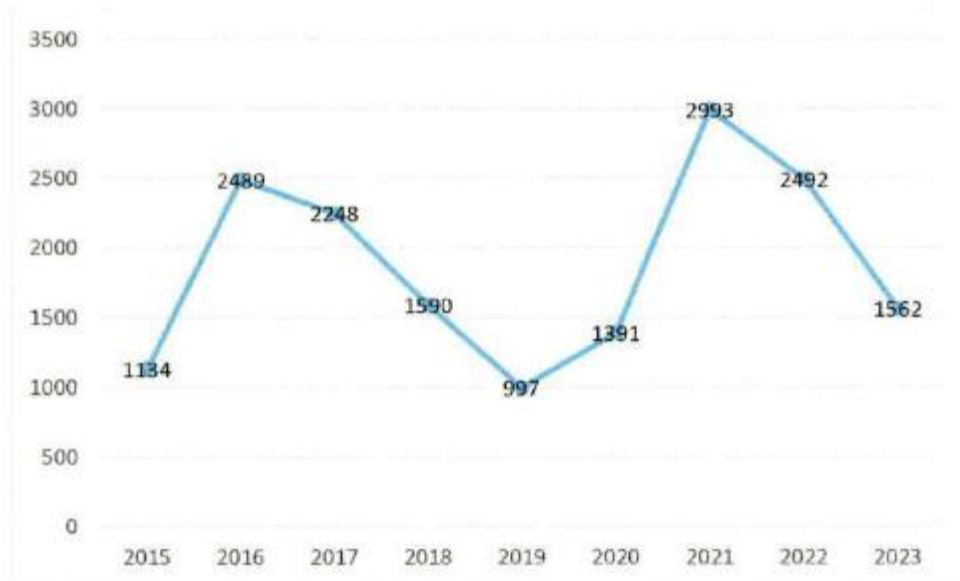
Curah hujan bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2022 berkisar 5 – 584 mm, tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli. Bulan basah (curah hujan >100 mm) pada tahun 2023 relatif panjang, yaitu bulan Januari – Juni dan Oktober-Desember.

Tabel 2.2.
Curah Hujan Tahunan, 2015-2023

No.	Tahun	Curah Hujan (mm)
1	2015	1.134
2	2016	2.489
3	2017	2.248
4	2018	1.590
5	2019	997
6	2020	1.391
7	2021	2.993
8	2022	2.492
9	2023	1.562

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

Gambar 2.6.
Curah Hujan Tahunan, 2015-2023



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

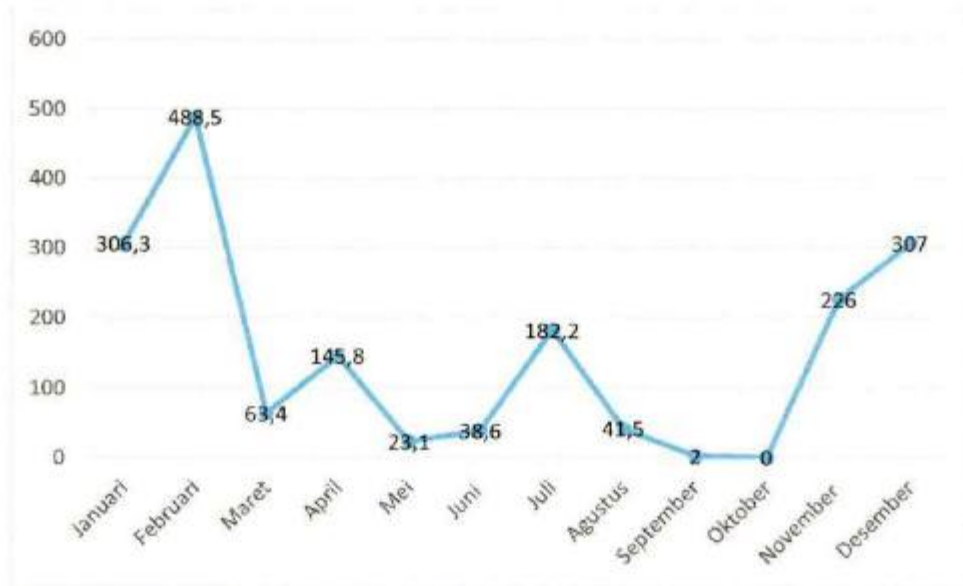
Tabel 2.3.
Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 (mm)

Bulan	Curah Hujan (mm)
Januari	306.3
Februari	488.5
Maret	63.4
April	145.8
Mei	23.1
Juni	38.6
Juli	182.2

Bulan	Curah Hujan (mm)
Agustus	41,5
September	2
Oktober	0
November	226
Desember	307

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

Gambar 2.7.
Curah Hujan Bulanan Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

3) Suhu Udara

Suhu udara rata-rata tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2023 berkisar 27,2 – 28,0 oC. Suhu udara rata-rata tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2016 sedangkan suhu rendah terjadi pada tahun 2015, 2017 sampai 2019. Sementara suhu udara rata-rata bulanan dalam tiga tahun terakhir berkisar 27,6 – 27,7 oC. Suhu udara rata-rata bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2022 berkisar 27,1 oC 28,1 oC. Suhu udara meningkat dari Januari sampai puncaknya di bulan April, kemudian menurun hingga suhu rata-rata terendah pada bulan Juli. Selanjutnya suhu meningkat kembali hingga mencapai 28,1 oC pada bulan Desember.

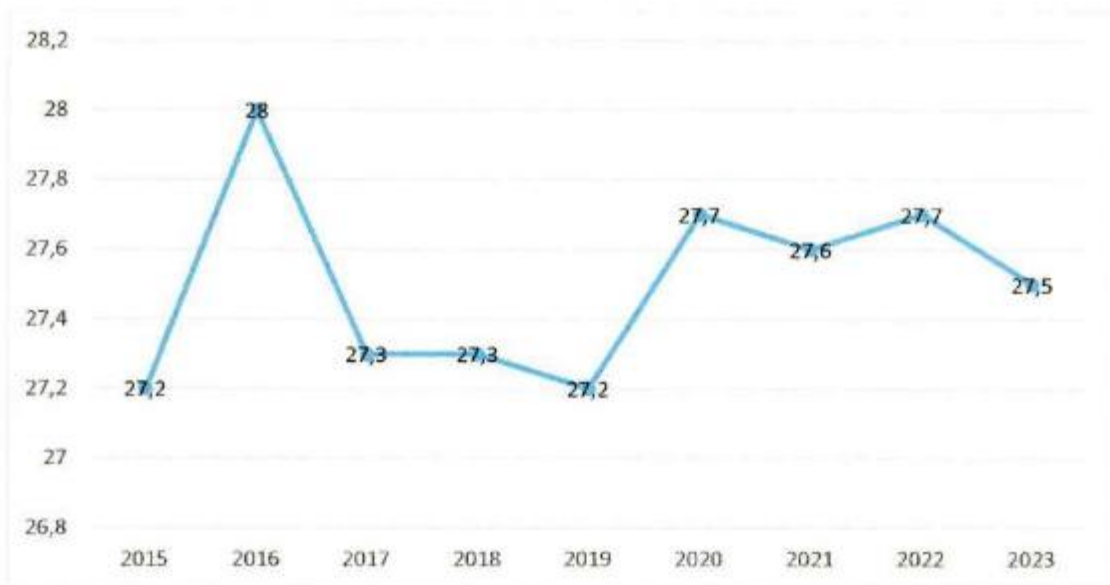
Tabel 2.4.
Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023

Tahun	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius)
2015	27,2

Tahun	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius)
2016	28,0
2017	27,3
2018	27,3
2019	27,2
2020	27,7
2021	27,6
2022	27,7
2023	27,5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.8.
Grafik Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

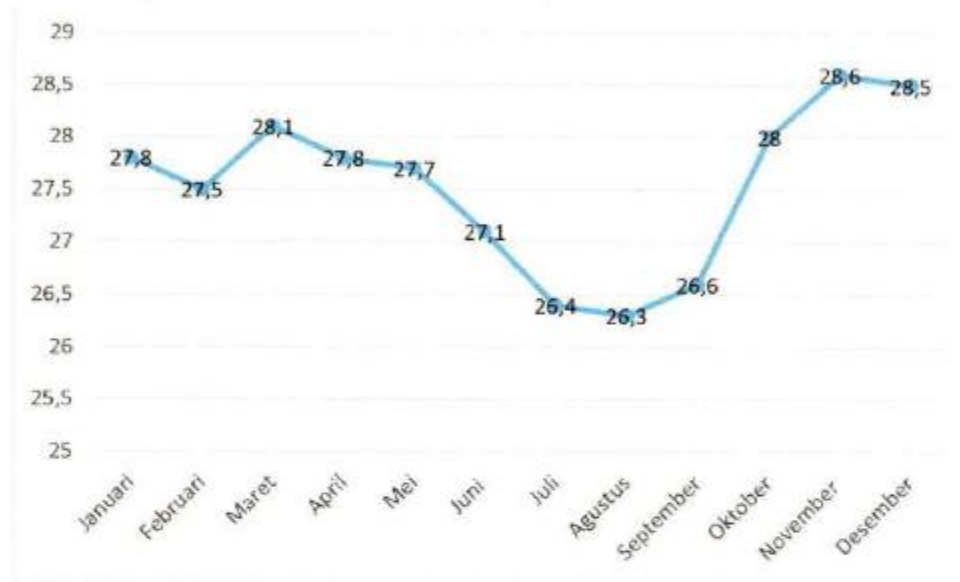
Tabel 2.5.
Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)

Bulan	Suhu Rata-Rata Bulanan (Derajat Celcius)
Januari	27.8
Februari	27.5
Maret	28.1
April	27.8
Mei	27.7
Juni	27.1
Juli	26.4
Agustus	26.3
September	26.6
Oktober	28

Bulan	Suhu Rata-Rata Bulanan (Derajat Celcius)
November	28.6
Desember	28.5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.9.
Grafik Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

4) Kelembaban Udara

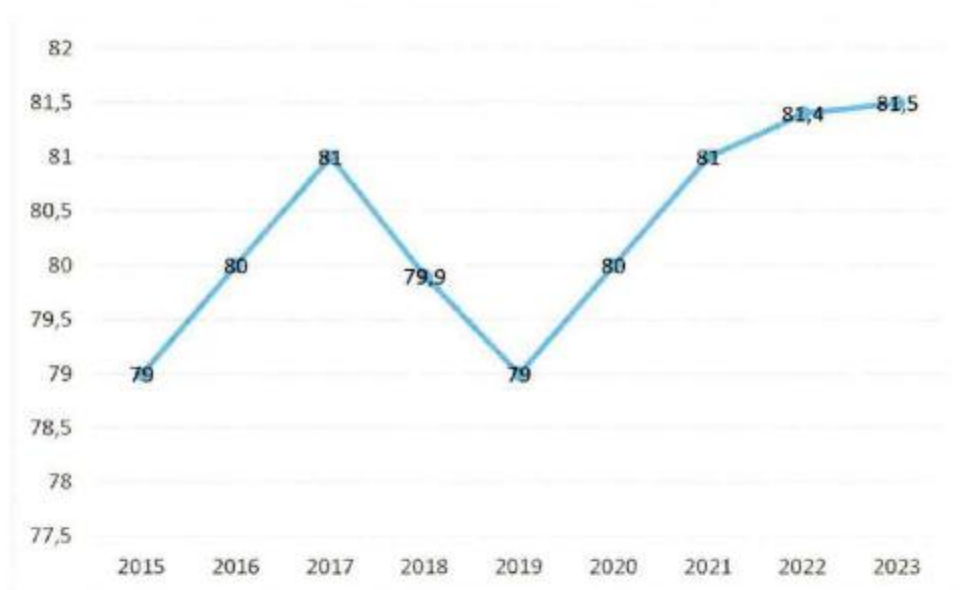
Kelembaban udara rata-rata tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2023 berkisar 79,0 – 81,4%. Kelembaban udara rata-rata tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2023 sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Kelembaban udara rata-rata bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2023 berkisar 78 – 84%. Kelembaban udara terendah pada bulan Juli dan tertinggi bulan Oktober.

Tabel 2.6.
Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan 2015-2023(%)

Tahun	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%)
2015	79
2016	80
2017	81
2018	79,9
2019	79
2020	80
2021	81
2022	81,4
2023	81,5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.10.
Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

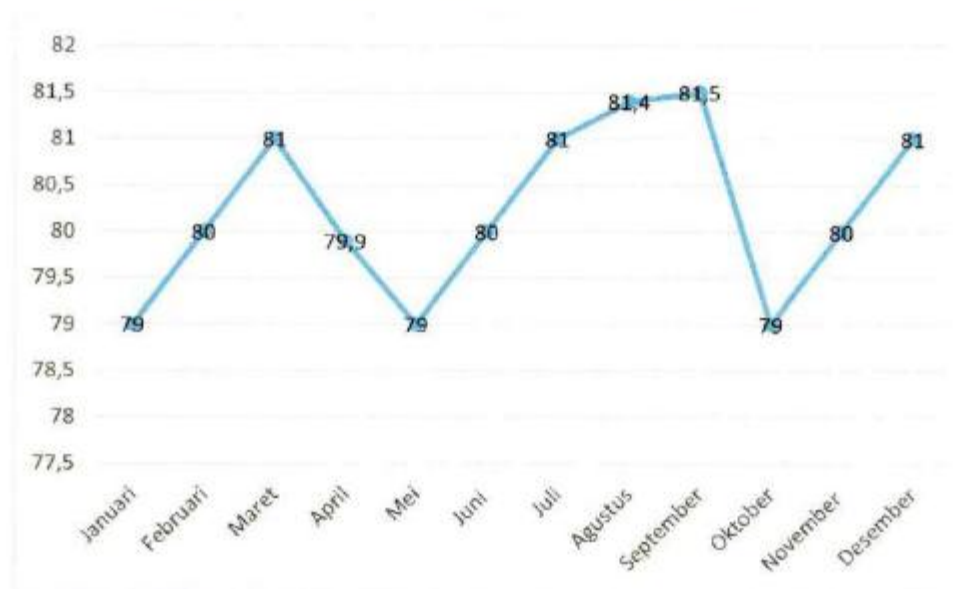
Tabel 2.7.
Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)

Bulan	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)
Januari	79
Februari	80
Maret	81
April	79.9
Mei	79
Juni	80
Juli	81
Agustus	81.4

Bulan	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)
September	81,5
Oktober	79
November	80
Desember	81

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.11.
Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

E. Karakteristik Ekoregion

1) Karakteristik Benteng Alam

Bentuk lahan (landform) Ekoregion Pulau Bali di dalam gugusan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepmen LHK Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia terdiri atas 8 (delapan) satuan ekoregion wilayah Provinsi Bali, meliputi:

- (1) Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok.
- (2) Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok
- (3) Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok
- (4) Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Bali-Lombok
- (5) Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok
- (6) Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok
- (7) Ekoregion Dataran Organik/Koral Bali-Lombok
- (8) Danau Pegunungan

Wilayah Kabupaten Badung terdiri atas 5 (lima) satuan ekoregion dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok

Satuan Ekoregion ini melingkupi sekitar 15,94% wilayah Kabupaten Badung, tersebar di Kecamatan Petang. Ekoregion ini terbentuk oleh kekuatan tektonik yang menghasilkan struktur-struktur geologis seperti lipatan, patahan, kubah, dan formasi lainnya. Struktur geologis tersebut terdiri dari batuan intrusif dan batuan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Morfologi wilayah ini berupa pegunungan dengan elevasi tinggi, lebih dari 300 meter di atas permukaan laut.

Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah Tanah Andosol dan Tanah Latosol. Tanah Andosol terbentuk dari abu vulkanik yang kaya akan unsur hara, sehingga sangat subur. Sementara itu, Tanah Latosol terbentuk dari bahan vulkanik yang juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Selain itu, di beberapa tempat seperti di lereng atas dan sepanjang aliran sungai, dapat ditemukan Tanah Regosol Kelabu yang berasal dari material letusan gunung berapi, yang juga memiliki kesuburan tinggi.

Karakteristik tanah dan morfologi wilayah ini menyebabkan pegunungan vulkanik di ekoregion ini memiliki tipe penutupan dan penggunaan lahan yang beragam. Di sini, terdapat hutan, semak belukar, padang rumput, ladang, dan sebagian kecil area permukiman. Keanekaragaman penggunaan lahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat setempat terhadap kondisi alam dan kesuburan tanah yang mendukung berbagai jenis vegetasi dan aktivitas pertanian.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah letusan vulkanik berupa jatuhan pyroklastik seperti abu, pasir, krikil dan batu pijar, juga aliran awan panas, serta aliran lahar maupun banjir bandang (*flushflood*). Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem sebagai habitat flora fauna, penyedia air permukaan dan air tanah, dan pemicu sirkulasi udara.

2. Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok

Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok melingkupi sekitar 39,72% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Abiansemai, Mengwi, Kuta Utara. Wilayah ini terdiri atas perbukitan yang terbentuk dari aktivitas vulkanik, meskipun tidak setinggi pegunungan. Tanahnya subur dan kaya akan mineral sebagai hasil dekomposisi bahan vulkanik.

Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok tersusun oleh batuan beku ekstrusif dan material pyroklastik sebagai hasil dari proses vulkanik yang membentuk morfologi perbukitan dan menempati elevasi sedang (< 300 m). Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini lebih banyak oleh Tanah Latosol dengan solum dalam yang berasal dari tuff vulkan tua yang memiliki tingkat kesuburan sedang sampai tinggi. Di beberapa tempat dapat dijumpai Tanah Regosol dengan tekstur kasar dan Tanah Mediteran dengan tekstur agak berat, kedua tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan sedang. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik

ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, seperti hutan, semak belukar, padang rumput, ladang dan permukiman.

Perbukitan vulkanik ini berada di bawah kondisi iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal hingga sejuk. Kondisi iklim yang demikian sumber daya air permukaan, air tanah, dan mata air cukup baik di musim penghujan, namun terbatas di musim kemarau. Sumber daya mineral umumnya berupa galian C (pasir dan batu), mempunyai keanekaragaman hayati relatif rendah hingga sedang. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini umumnya bertani atau berladang dan berternak, sedangkan tingkat pendidikan mereka agak tertinggal, baik disebabkan oleh karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah aliran lahar dan banjir bandang (*flushflood*). Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa lingkungan sebagai penyedia air permukaan dan air tanah, dan lahan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan.

3. Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok

Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok yang melingkupi sekitar 15,89% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta. Ekoregion ini merupakan dataran fluvial yang terbentuk dari aktivitas sungai dengan sebaran Tanah di wilayah ini merupakan sedimentasi sungai yang menciptakan kesuburan untuk pertanian.

Daerah ini tersusun oleh material aluvium yang merupakan hasil proses pengendapan aliran air permukaan (sungai) yang membawa sedimen dari daerah hulu. Dataran fluvial menempati areal elevasi rendah, berupa dataran aluvial atau dataran antar perbukitan. Tanah yang terbentuk di dataran ini lebih banyak Tanah Aluvial Hidromorf (*Endoaquepts*) yang kaya akan unsur hara akibat proses endapan aluvium sungai tetapi memiliki kendala drainase buruk kecuali untuk sawah dan mempunyai kelas kemampuan lahan yang tinggi. Selain itu, di beberapa tempat juga dapat dijumpai Tanah Grumusol (*Haplusterts*) yang cukup subur. Sifat khas tanah Grumusol adalah melumpur pada saat musim hujan dan merekah--rekah pada musim kemarau, sehingga sulit untuk diolah. Karakteristik yang demikian menyebabkan dataran fluvial ini mempunyai beragam penutupan/penggunaan lahan, seperti sawah, ladang, permukiman, dan padang rumput.

Dataran fluvial di Bali – Nusa Tenggara berada di bawah kondisi iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal, sehingga sumber daya air permukaan dan air tanah cukup beragam. Beberapa sungai besar mengalir sepanjang tahun (perennial) dan sebagian sungai yang lebih kecil hanya mengalir pada musim penghujan (inter-mitten). Sumber daya mineral umumnya tidak ada, sedangkan keanekaragaman hayati relatif rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah dataran fluvial umumnya bertani atau berladang dan berternak, tetapi sebagian agak tertinggal pendidikannya, disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini adalah banjir di musim penghujan, kekeringan dan kebakaran di musim kemarau, tsunami di dataran fluvial bagian selatan, serta kemiskinan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan karakteristik tersebut, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem sebagai wilayah pertanian dan peternakan yang dapat mendukung ketahanan pangan.

4. Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok

Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok melingkupi sekitar 6,32% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Dataran pantai tersusun oleh aluvium marin sebagai hasil proses pengendapan sedimen oleh arus dan gelombang laut di sepanjang marin, termasuk di daerah muara sungai (*estuarin*). Dataran ini menempati areal dengan elevasi rendah di sepanjang pantai.

Tanah yang mendominasi pada ekoregion ini umumnya tanah--tanah hidromorfik (*Endoaquepts, Endoaquents*) yang sebagian dipengaruhi oleh air laut dan sebagian lagi oleh air payau yang berpotensi membentuk lapisan berkadar pirit tinggi, yang berpotensi menimbulkan masalah tanah sulfat masam. Di sebagian tempat masih dapat dijumpai tanah Regosol (*Ustipsamments*) yang berkembang dari proses aluvium marin berupa endapan kasar/pasir. Umumnya mempunyai kesuburan sedang, begitu pula dengan kelas kemampuan lahannya. Karakteristik yang demikian menyebabkan dataran marin ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan agak beragam, seperti hutan mangrove (bakau), padang rumput, ladang dan permukiman.

Dataran Marin di Bali – Nusa Tenggara berada di bawah kondisi iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal marin. Dengan kondisi iklim yang demikian sumber daya air permukaan dan air tanah cukup baik di musim penghujan namun agak terbatas di musim kemarau. Sumber daya mineral umumnya tidak ada dan mempunyai keanekaragaman hayati yang rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah dataran marin ini umumnya nelayan, berladang, dan berternak. Sebagian dari mereka pendidikannya agak tertinggal, disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain kerusakan hutan mangrove, banjir di musim hujan, dan pertumbuhan permukiman yang dapat merusak ekosistem. Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem berupa lahan pertanian dan perikanan darat (tambak) sehingga dapat untuk mendukung ketahanan pangan.

5. Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok

Bukit Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan merupakan Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok yang melingkupi sekitar 22,13% wilayah Kabupaten Badung. Perbukitan karst/solusional tersusun oleh batu kapur atau batu gamping (*limestone*) yang sebelumnya terbentuk dari dasar laut dangkal, kemudian terangkat ke permukaan berkat adanya tenaga tektonik. Karena sifat batuan yang mudah larut oleh air hujan, maka di Bali – Nusa Tenggara yang mempunyai

iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal masih mampu membentuk perbukitan yang mempunyai bentuk unik sebagai hasil proses pelarutan yang dinamakan perbukitan solusional/karst. Perbukitan ini diselingi oleh dataran atau cekungan antar bukit dan menempati elevasi sedang (< 300 m).

Tanah yang umumnya dijumpai lebih banyak oleh Tanah *Terarosa* yang berasal dari bahan induk batu kapur yang relatif miskin hara, tanah lain yang juga dijumpai adalah Tanah Litosol yang memiliki solum dangkal akibat proses pelapukan yang sangat lambat serta miskin unsur hara dengan tingkat kemasaman yang rendah, sehingga tanah-tanah yang dijumpai pada ekoregion ini berada pada kelas kemampuan lahan yang rendah. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan karst ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan yang terbatas, seperti semak belukar, ladang dan permukiman.

Sumber daya air sangat terbatas di permukaan meskipun pada musim penghujan namun cukup melimpah di bawah tanah (sungai bawah tanah), dengan kualitas bervariasi dari sedang hingga rendah disebabkan oleh kandungan karbonat yang tinggi serta adanya bakteri *colli*.

Sumber daya mineral umumnya berupa batu galian batugamping (golongan C) sedangkan keanekaragaman hayati terbatas pada flora fauna yang adaptif terhadap pada tanah basa (*jati, mahoni, sengon*). Masyarakat yang tinggal di wilayah ini umumnya bertani atau berladang dan berternak, sedangkan tingkat pendidikan mereka umumnya tertinggal, baik disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

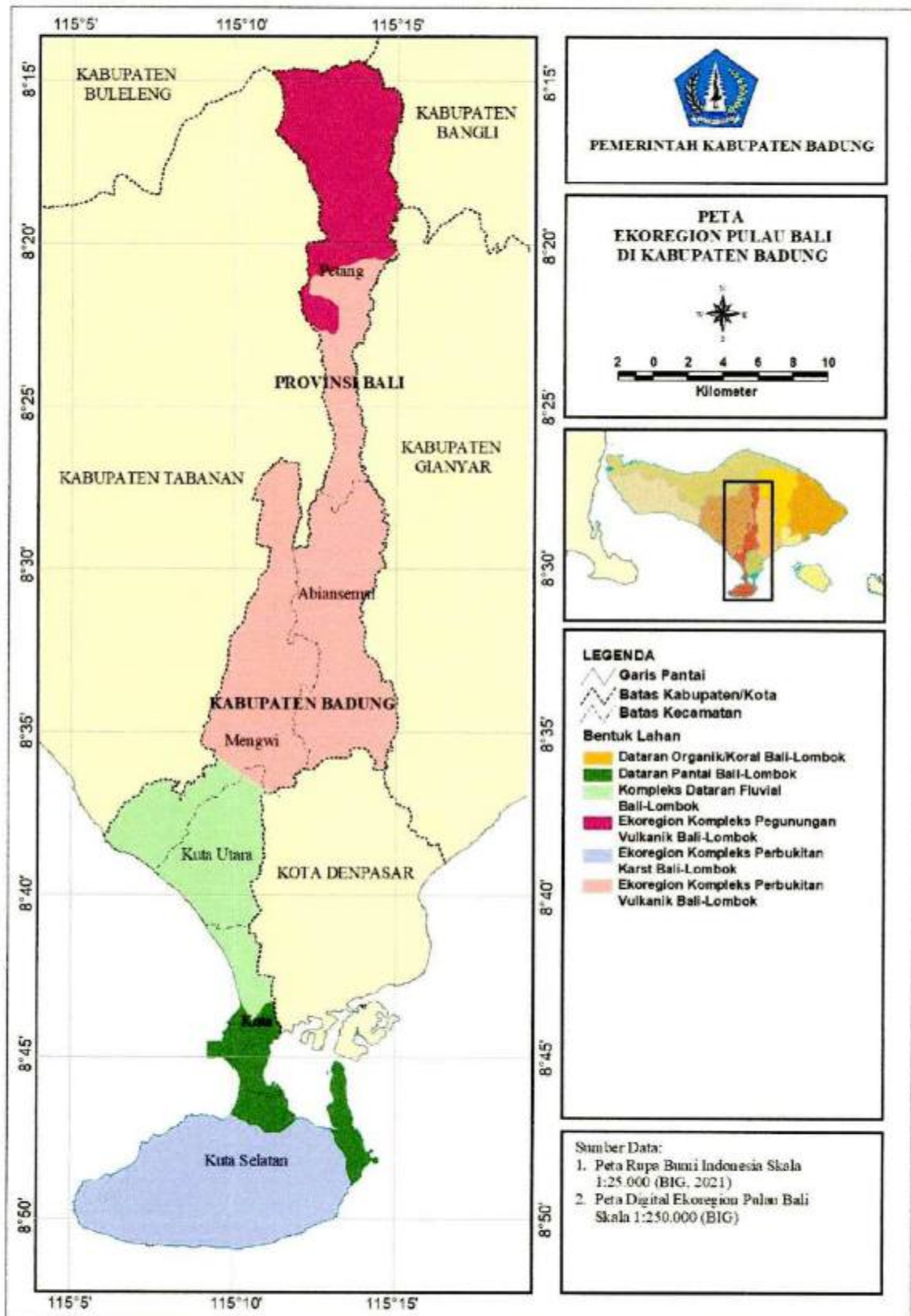
Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah kekeringan karena terbatasnya air permukaan, kekritisn lahan karena tipisnya solum tanah, atau subsiden/runtuhnya permukaan tanah dimana di bawahnya terdapat gua kapur. Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem berupa penyerapan CO₂ di udara (carbon sink), sehingga dapat membantu menurunkan pemanasan global secara alam.

Tabel 2.8.
Distribusi Ekoregion Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung

No	Nama Wilayah Ekoregion	Luas (Ha)	Sebaran
1	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok	6.347,86	Kecamatan Petang
2	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanin Bali-Lombok	15.842,12	Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara
3	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok	6.330,04	Kecamatan Mengwi, Kuta, Kuta Utara
4	Ekoregion Dataran Pantai Bali Lombok	2.516,78	Kecamatan Kuta, Kuta selatan
5	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok	8.815,68	Kecamatan Kuta Selatan
	Jumlah	39.834,49	

Sumber: Peta Ekoregion Bali Nusa Tenggara Skala 1.:250.000 (Badan Informasi Geospasial) dengan Penyesuaian Garis Pantai

Gambar 2.12.
Peta Ekoregion Pulau Bali di Kabupaten Badung



2) Karakteristik Vegetasi Alam

Vegetasi adalah keseluruhan tutupan tumbuhan pada suatu kawasan yang terdiri atas mosaik komunitas tumbuhan dalam suatu lanskap. Komunitas tumbuhan adalah kumpulan populasi berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah dan kelompok tersebut terjadi secara berulang-ulang. Kelompok tersebut dapat dideskripsikan dengan baik dengan mencatat identitas dan bentuk pertumbuhan spesies yang paling melimpah, spesies yang berdimensi besar, atau spesies paling unik dalam komunitasnya (Mueller-Dombois and Fosberg, 1998).

Berbagai tipe vegetasi terdapat di Bali, mulai dari tipe vegetasi yang selalu basah hingga kering musiman, terbentang dari daerah pantai yang terendam hingga puncak gunung. Sebaran tipe vegetasi sepanjang musim hujan bertepatan dengan kisaran tipe curah hujan B menurut Schmidt dan Ferguson. Tipe vegetasi kering musiman tersebar di seluruh rentang tipe curah hujan Schmidt dan Ferguson C-E dan terbatas pada wilayah dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.000 mdpl. Hutan monsun terdapat pada ketinggian 0-800 m (Monk et al., 1997).

Karakteristik vegetasi alami Pulau Bali di wilayah Kabupaten Badung menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/ PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, meliputi:

(1) Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah

Hutan pegunungan bawah adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah satu cirinya, hutan ini kerap diselimuti awan, biasanya pada ketinggian atap tajuk (kanopi)nya. Pepohonan dan tanah di hutan ini acapkali tertutupi oleh lumut, yang tumbuh berlimpah-limpah. Pohon-pohon banyak digelayuti lumut, epifit, termasuk berbagai jenis anggrek. Tipe vegetasi ini terdapat di Kecamatan Petang, di atas ketinggian 1000 m dpl. Pada zona ini lebih banyak oleh beberapa famili tumbuhan diantaranya *Anacardiaceae*, *Burseraceae*, *Capparaceae*, *Combretaceae*, *Dilleniaceae*, *Dipterocarpaceae*, dan *Myristicaceae*.

(2) Vegetasi Hutan Pamah (non dipterokarpa)

Vegetasi hutan pamah merupakan vegetasi dataran rendah yang cukup tinggi sebarannya, khususnya di bagian tengah Kabupaten Badung. Terletak pada ketinggian antara 0-1000 m di atas permukaan laut. Jenis dominan dari tegakan non dipterokarpa antara lain *Aglaiia sp.*, *Madhuca sp.*, *Diospyros sp.* dan *Dillenia sp.*

(3) Vegetasi Hutan Pamah Monsun Malar Hijau

Dalam wilayah monsun, hutan dapat mencakup hutan gugur musiman dan hutan hijau sepanjang tahun, dimana tumbuhan tidak menggugurkan daunnya bahkan selama periode kekeringan parah. Struktur hutan monsun yang selalu hijau secara umum mirip dengan hutan hujan yang selalu hijau, tetapi perawakannya

lebih pendek dan stratifikasinya tidak terlalu rumit. Tipe vegetasi ini tersebar di Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta.

(4) Vegetasi Mangrove Monsun

Hutan mangrove bersama komunitas nipah (*Nypa fruticans*) dan komunitas herba *Acrostichum aureum* sering disebut sebagai hutan rawa pasang surut dan rawa asin. Kawasan hutan mangrove mencakup wilayah kecil yang ditemukan di Teluk Benoa Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Komposisi spesies dan struktur hutan mangrove bervariasi sesuai dengan kondisi habitat, mulai dari komunitas kerdil dan jarang yang terdiri atas satu spesies (*Rhizophora stylosa*) yang tumbuh di terumbu karang (Budiman *et al.*, 1986) hingga hutan campuran yang tinggi dan lebat yang tumbuh di lumpur dalam. Pasokan air tawar, yang mempengaruhi salinitas, sifat substrat, dan pola pergerakan pasang surut terkait dengan frekuensi penggenangan, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan zona vegetasi. Pada lumpur yang lebih padat dan keras, spesies palem *Nypa fruticans* biasanya dominan. Pada substrat terbuka dan kering, spesies famili sedge juga dapat ditemukan. *Fimbristylis argentea*, *Fimbristylis politrichoides* (seringkali sangat melimpah), dan *Cyperus javanicus* (Kern, 1974).

(5) Vegetasi Litoral

Vegetasi litoral umumnya berkembang di daerah pantai berpasir atau berbatu dengan air asin dangkal, tidak terpengaruh oleh sungai besar. Tipe vegetasi ini bersama dengan tipe vegetasi mangrove termasuk dalam vegetasi yang dipengaruhi oleh air asin. Tipe vegetasi ini terdapat di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan.

(6) Vegetasi Hutan Batugamping Pamah Monsun Mengangas Pada Bentang Alam Karst

Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada daerah karst dengan kondisi iklim monsun dan curah hujan yang meranggas. Vegetasi ini biasanya tumbuh pada daerah yang memiliki batuan kapur dan terdapat pada dataran rendah hingga ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebaran tipe vegetasi ini terdapat di Bukit Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan.

Tabel 2.9.
Distribusi Tipe Vegetasi Alami Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung

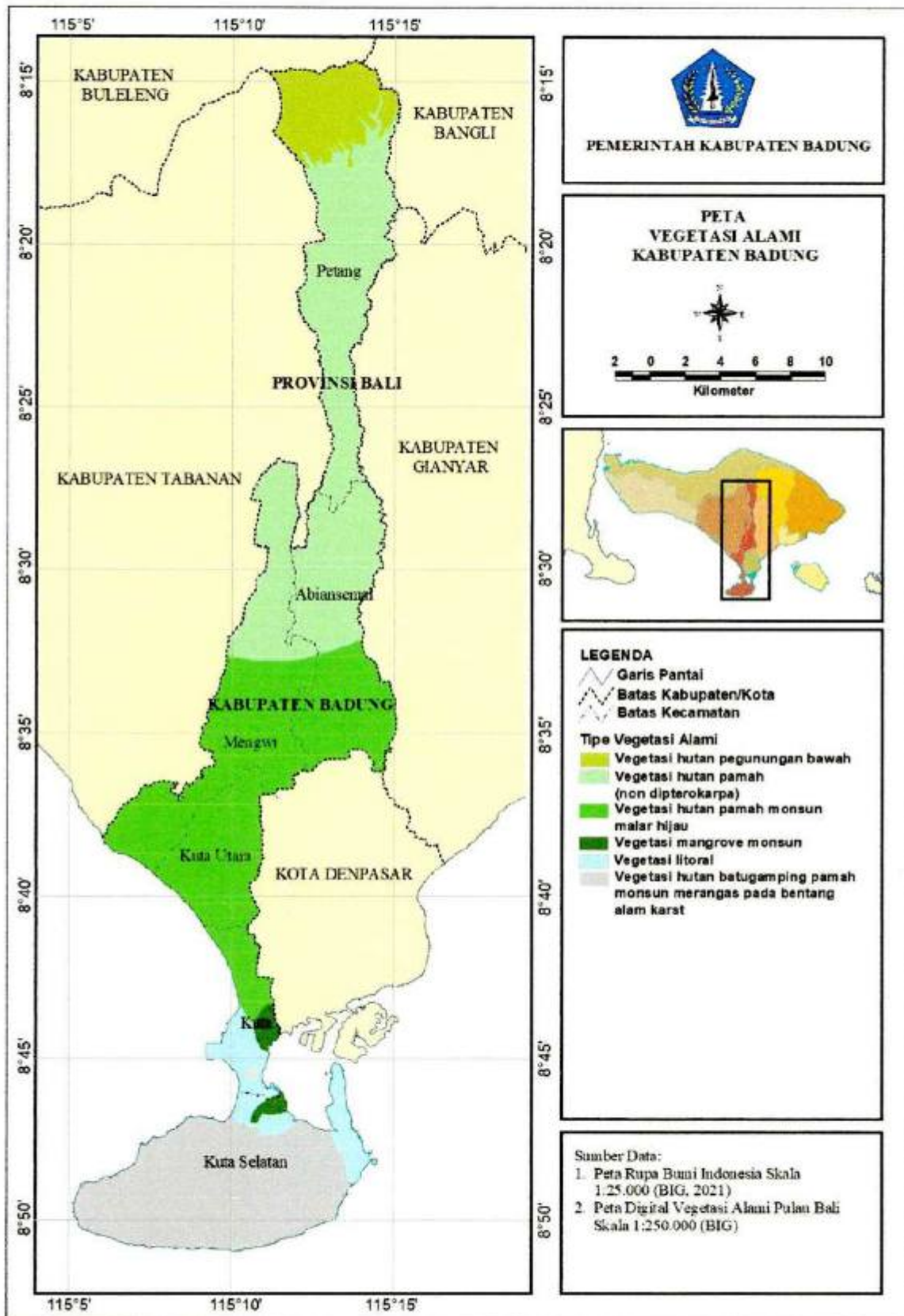
No	Tipe Vegetasi	Luas (Ha)	Sebaran
1	Vegetasi hutan pegunungan bawah	2.813,06	Kecamatan Petang
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarma)	12.905,67	Kecamatan Petang, Mengwi, Abiansemal
3	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	12.783,30	Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara
4	Vegetasi mangrove monsun	447,67	Kecamatan Kuta, Kuta Selatan

No	Tipe Vegetasi	Luas (Ha)	Sebaran
5	Vegetasi litoral	2.675,25	Kecamatan Kuta, Kuta Selatan
6	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	8.821,62	Kecamatan Kuta Selatan
Jumlah		40.428,58	

Sumber : Peta Ekoregion Bali Nusa Tenggara Skala 1:250.000 (Badan Informasi Geospasial) dengan Penyesuaian Garis Pantai



Gambar 2.13.
Peta Vegetasi Alami Pulau Bali di Kabupaten Badung



F. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan data digital tutupan lahan skala 1:250.000 dari BIG, terdapat tiga jenis tutupan lahan yang mendominasi wilayah Kabupaten Badung, yaitu Pertanian Lahan Kering Campuran, Permukiman, dan Sawah. Pertanian Lahan Kering Campuran terutama mendominasi wilayah Kecamatan Petang dan Kuta Selatan. Sawah mendominasi wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal. Sedangkan Permukiman mendominasi wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Utara.

Tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campuran pada tahun 2022 mencapai 30,85%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Tutupan lahan Sawah sebesar 28,95%, menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 30,29%. Sedangkan Permukiman sebesar 30,18%, meningkat dari 29,92% di tahun 2020.

Tutupan lahan hutan relatif kecil, terdiri atas Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, dan Hutan Mangrove Sekunder. Tutupan lahan lainnya semuanya dengan porsi kurang dari 1%, meliputi Belukar, Tanah Terbuka, Savana/Padang Rumput, Tubuh Air, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Tambak, dan Bandara/Pelabuhan.

Proporsi tutupan lahan bervegetasi pada tahun 2022 (meliputi Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, Belukar, Hutan Mangrove Sekunder, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campuran, dan Sawah) sebesar 68,62% dari luas total daratan (tidak termasuk tubuh air). Proporsi lahan bervegetasi cenderung menurun dari 70,32% pada tahun 2018 dan 68,89% pada tahun 2020. Sedangkan proporsi lahan terbangun (permukiman dan bandara/Pelabuhan) terhadap total luas wilayah pada tahun 2022 sebesar 30,88%, meningkat dari 28,95% di tahun 2018 dan 30,54% di tahun 2020.

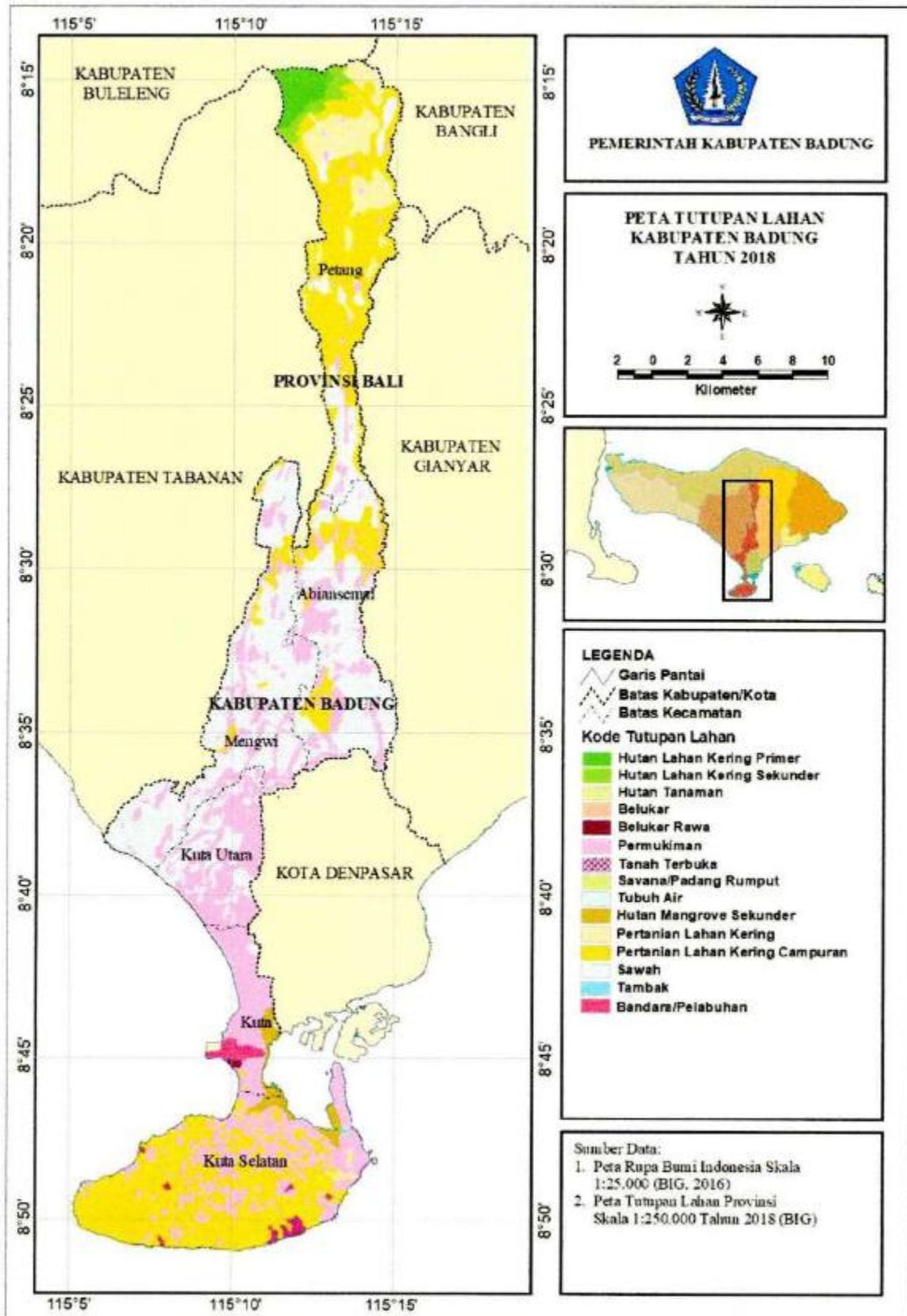
Tabel 2.10.
Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018, 2020, dan 2022

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)			Persentase (%)		
		2018	2020	2022	2018	2020	2022
1	Hutan Lahan Kering Primer	637,35	637,35	637,35	1,60	1,60	1,60
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	429,47	419,53	358,90	1,08	1,05	0,90
3	Hutan Tanaman	13,61	13,61	23,75	0,03	0,03	0,06
4	Belukar	6,42	217,41	304,90	0,02	0,55	0,77
5	Pemukiman	11.277,77	11.915,27	12.027,82	28,33	29,92	30,18
6	Tanah Terbuka	270,19	207,35	181,21	0,68	0,52	0,45
7	Savana/Padang Rumput	93,51	4,13	130,72	0,23	0,01	0,33
8	Tubuh Air	16,66	57,10	57,10	0,04	0,14	0,14
9	Hutan Mangrove Sekunder	530,69	597,87	589,59	1,33	1,50	1,48
10	Belukar Rawa	26,53	-	-	0,07	-	-
11	Pertanian Lahan Kering	1.892,76	1.427,49	1.444,72	4,76	3,58	3,62

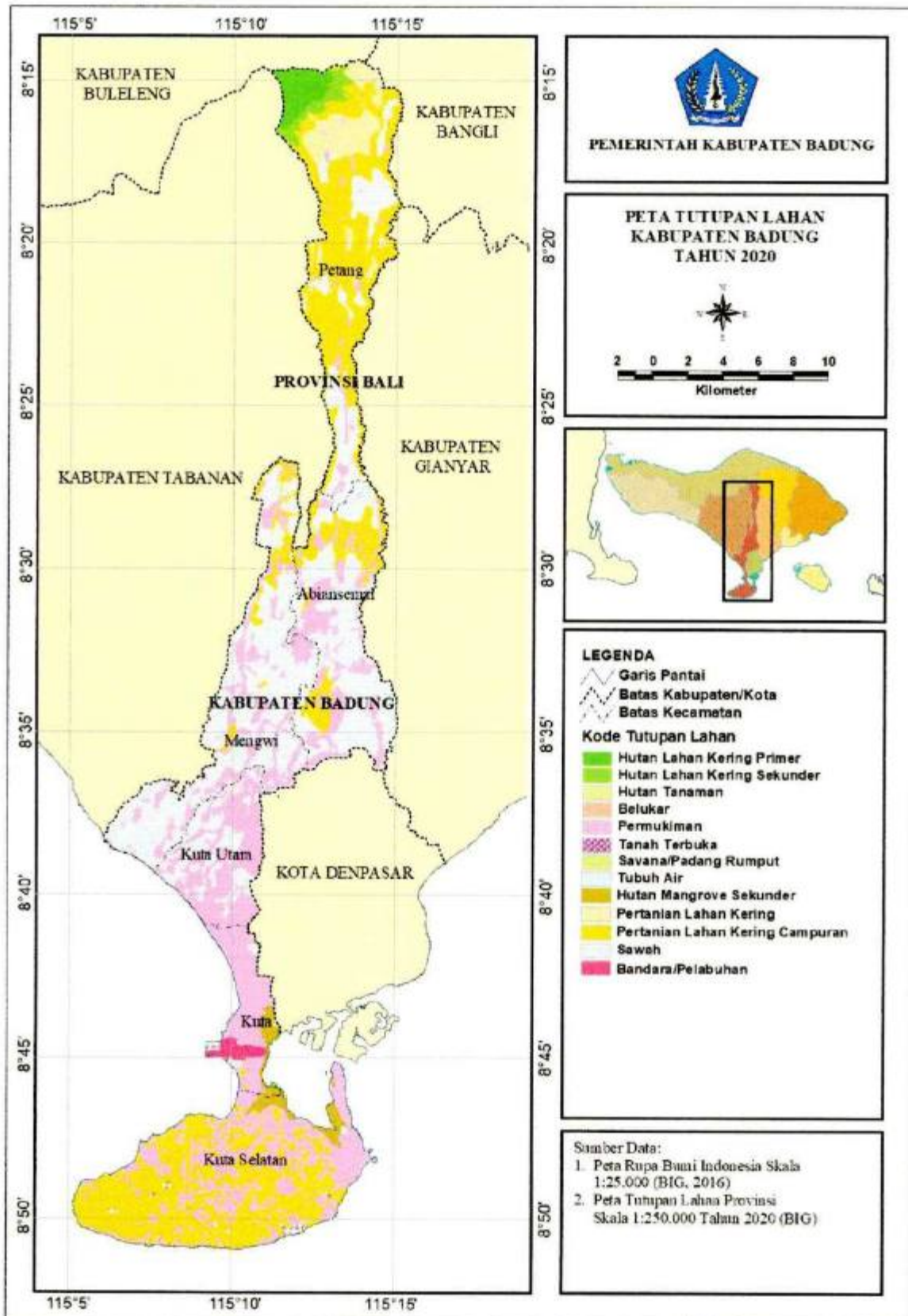
No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)			Persentase (%)		
		2018	2020	2022	2018	2020	2022
12	Pertanian Lahan Kering Campuran	12.498,13	12.015,45	12.282,69	31,40	30,17	30,82
13	Sawah	11.849,22	12.064,58	11.536,28	29,77	30,29	28,95
14	Tambak	15,80	-	-	0,04	-	-
15	Bandara/Pelabuhan	243,75	248,87	280,70	0,61	0,62	0,70
	Jumlah	39.801,85	39.825,99	39.855,73	100	100	100

Sumber: Peta Digital Tutupan Lahan Provinsi Bali Skala 1:250.000 Tahun 2018, 2020 dan 2022

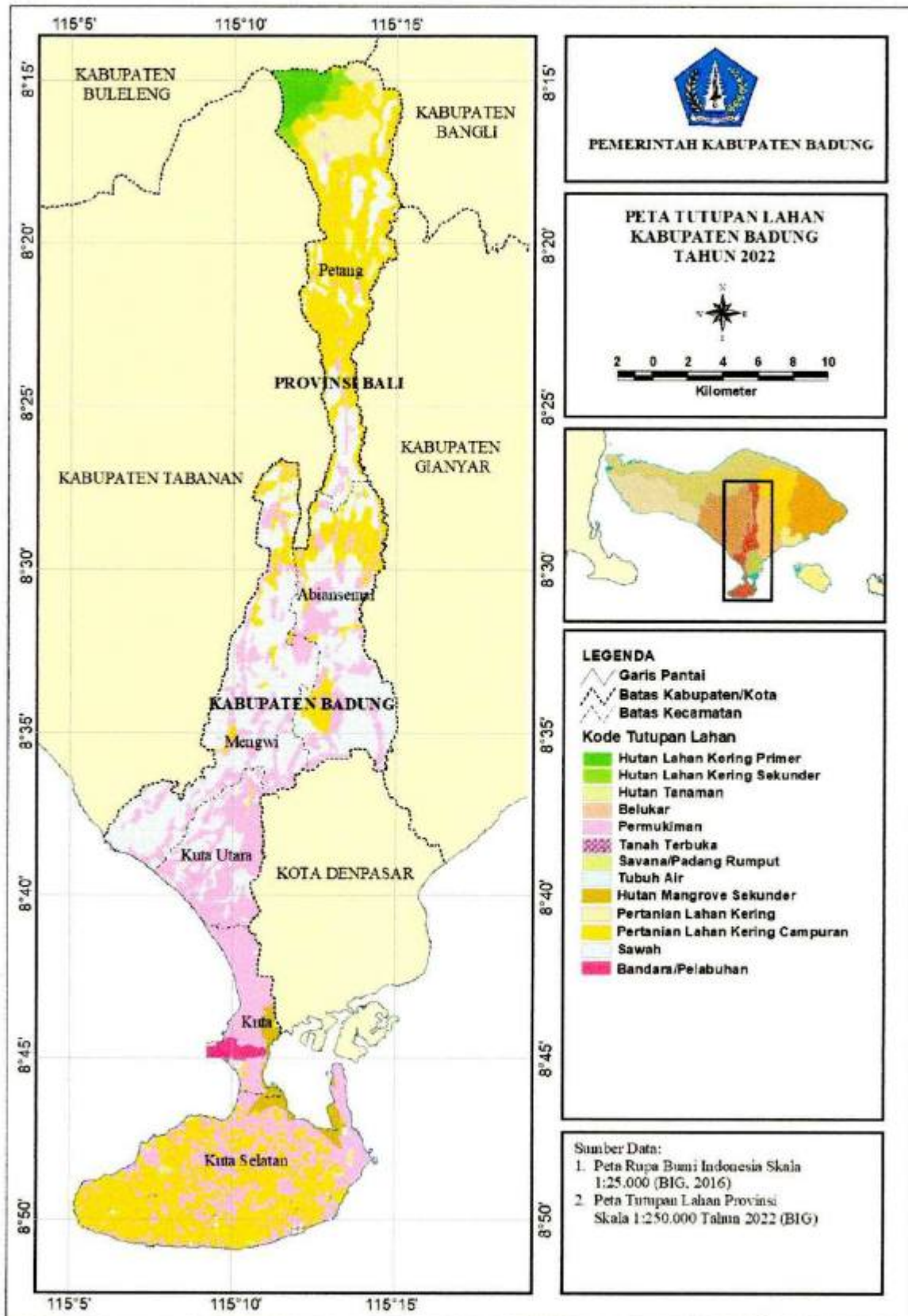
Gambar 2.14.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018



Gambar 2.15.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2020



Gambar 2.16.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2022



G. Persentase Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan proses suatu area atau lahan yang sebelumnya digunakan untuk satu tujuan tertentu, kemudian diubah atau dialihkan untuk tujuan yang berbeda. Proses ini sering kali terjadi sebagai hasil dari perkembangan perkotaan, pertumbuhan ekonomi atau perubahan kebutuhan masyarakat. Pada banyak kasus, alih fungsi lahan terjadi ketika lahan pertanian atau lahan kosong atau hutan diubah menjadi lahan komersial, perumahan ataupun industri.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Bali pada umumnya dan juga di Kabupaten Badung pada khususnya. Isu alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian telah mencuat sejak beberapa dekade terakhir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata. Alih fungsi lahan terutama terkait dengan peningkatan penyusutan lahan pertanian dengan laju yang semakin meningkat.

Pertanian sawah di Bali tidak hanya penting untuk menopang ketahanan pangan tetapi jauh daripada itu, pertanian sawah di Bali merupakan akar atau basis dari kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang dilandasi oleh agama Hindu. Oleh karena itu, penyusutan lahan pertanian secara sistematis sangat mengancam kesetarian budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung. Luas alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Badung relatif tinggi. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.10, selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 976,42 Ha dimana lahan pertanian yang mengalami alih fungsi paling luas adalah Pertanian Lahan Kering (23,67%).

H. Hidrologi

1) Sungai

Di wilayah Kabupaten Badung mengalir dua sungai besar yang merupakan sungai lintas kabupaten/kota, yaitu Tukad Yeh Penet dan Tukad Ayung. Selain itu, juga terdapat sejumlah sungai parenial yang bermuara di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta. Sedangkan sungai di Kecamatan Kuta Selatan semuanya sungai intermiten. Sungai-sungai parenial di Kabupaten Badung sebagai berikut:

1. Tukad Yeh Penet.

Tukad Yeh Penet bermuara di perbatasan Kabupaten Badung dan Tabanan. Alirannya meliputi wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Tukad Yeh Penet mempunyai sejumlah anak dan anak-anak sungai, sebagai berikut:

- a) Tukad Ulaman, mengalir di Desa Kekeran, Mengwitani, dan Mengwi. Sungai ini mempunyai satu anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Ukian, mengalir di Desa Mengwitani, Mengwi, dan Werdi Bhuana.
- b) Tukad Jejek, mengalir di Desa Kekeran, Mengwitani, dan Mengwi.
- c) Tukad Sauh, mengalir di Desa Kekeran, Mengwitani, dan Kapal.
- d) Tukad Tangeb, mengalir di Desa Kapal.
- e) Tukad Dangkang, mengalir di Desa Gulingan, Baha, Sobangan, Ayunan, Sembung, dan Kuwun. Tukad Dangkang mempunyai dua anak sungai order 3 yaitu:

- Tukad Bengawan, mengalir di Desa Gulingan, Baha, dan Sobangan.
- Tukad Sayan, mengalir di Desa Baha, Sobangan, dan Sembung. Tukad Sayan memiliki anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Bangka, mengalir di Desa Sobangan, Werdi Bhuana, dan Sembung.
- f) Tukad Cepung, mengalir di Desa Pangsan dan Petang. Tukad Cepung mempunyai satu anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Sanga, mengalir di Desa Petang dan Sulangai.
- g) Telabah Carangsari, mengalir di Desa Carangsari.

2. Tukad Ayung.

Tukad Ayung bermuara di Kabupaten Badung. Alirannya paling hilir di Kabupaten Badung berada di perbatasan Desa Darmasaba dan Sibang Gede. Kearah hulu alirannya meliputi Desa Sibang Kaja, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, Carangsari, Getasan, Pangsan, Petang, dan Beloksidan. Tukad Ayung mempunyai sejumlah anak dan anak-anak sungai, sebagai berikut:

- a) Tukad Anggabaya, mengalir di Desa Sibang Gede. Tukad Anggabaya mempunyai satu anak sungai sebagai order 4 yaitu:
 - Tukad Kauh, mengalir di Desa Sibang Gede, Sibang Kaja, Mekar Bhuana, dan Mambal.
- b) Tukad Titis, mengalir di Desa Jagapati, Angantaka, dan Sedang.
- c) Tukad Batangbuah, mengalir di Desa Sibang dan Sibang Kaja.
- d) Tukad Bangiang, mengalir di Desa Darmasaba, Sibang Kaja, Penarungan, dan Abiansemal.
- e) Tukad Gerubukan, mengalir di Desa Sibang Kaja dan Mambal
- f) Tukad Jempeng, mengalir di Desa Abiansemal, Bongkasa, Taman dan Bongkasa Pertiwi. Tukad Jempeng mempunyai dua anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Medid, mengalir di Desa Abiansemal, Punggul, dan Taman Tukad Medid mempunyai 3 anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Tegalanting, mengalir di Desa Blahkiuh, Punggul, dan Selat. Tukad Tegalanting mempunyai satu anak sungai sebagai order 5 yaitu:
 - Tukad Adeng, mengalir di Desa Blahkiuh, Sangeh, Selat, dan Carangsari.
 - Tukad Mumul, mengalir di Desa Punggul, Selat, Taman, dan Carangsari.
 - Pangkung Tabah, mengalir di Desa Taman, Selat, dan Carangsari. Pangkung Tabah mempunyai satu anak sungai sebagai order 5 yaitu:
 - Pangkung Jempeng, mengalir di Desa Taman, Carangsari, Getasan, dan Pangsan.
- g) Tukad Buangga, mengalir di Desa Pangsan dan Petang.

- h) Tukad Bangkung, mengalir di Desa Petang, Sulangai, Pelaga, dan Beloksidan. Tukad Bangkung mempunyai empat anak sungai sebagai order 3, yaitu:
- Tukad Ngongkong, mengalir di Desa Petang, Sulangai, dan Pelaga. Tukad Ngongkong mempunyai empat anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Kilap, mengalir di Desa Sulangai dan Pelaga Tukad Kilap mempunyai dua anak sungai sebagai order 5, yaitu:
 - Tukad Cengkedek, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Duk, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Kayung, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Sanuah, mengalir di Desa Pelaga.
 - Pangkung Pelaga, mengalir di Desa Pelaga.
 - Pangkung Penataran, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Jempanang, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Bon, mengalir di Desa Beloksidan.
- i) Tukad Mengani, mengalir di Desa Beloksidan. Tukad Mengani mempunyai satu anak sungai sebagai order 3, yaitu:
- Tukad Bade, mengalir di Desa Beloksidan.
3. Tukad Surungan, bermuara dan mengalir di perbatasan Desa Cemagi dan Munggu.
4. Pangkung Tebin, bermuara dan mengalir di Desa Munggu.
5. Tukad Baosan, bermuara di perbatasan Desa Munggu dan Pererenan dan aliran hulunya di Desa Tumbakbayuh.
6. Tukad Pangi, bermuara di Desa Pererenan dan alirannya meliputi Desa Tumbakbayuh, Buduk, dan Abianbase. Tukad Pangi mempunyai satu anak sunyai sebagai order 2 yaitu:
- a) Tukad Miyah, mengalir di Desa Pererenan, Cunggu, Tumbakbayuh, dan Buduk.
7. Tukad Cunggu, bermuara di perbatasan Desa Cunggu dan Tibubeneng, dan alirannya meliputi Dalung, Buduk, dan Abianbase.
8. Tukad Yeh Poh, bermuara di perbatasan Desa Tibubeneng dan Kerobokan Kelod, dan alirannya meliputi Desa Kerobokan, Kerobokan Kaja, dan Dakung. Tukad Yeh Poh mempunyai satu anak sunyai sebagai order 2 yaitu:
- a) Tukad Umalas, mengalir di Desa Kerobokan Kelod, Kerobokan, Kerobokan Kaja, Dalung, Abianbase, Kapal, dan Lukluk.
- b) Tukad Semat, mengalir di Desa Tibubeneng dan Dalung.
9. Tukad Mati, bermuara di Teluk Benoa, Desa Tuban dan alirannya meliputi Desa Kuta, Legian, dan Seminyak.

10. Tukad Badung, bermuara di Kabupaten Badung. Alirannya di Kabupaten Badung berada di Desa Sading. Anak sungai Badung di Kabupaten Badung yaitu:
- Tukad Langan, mengalir di Desa Sempidi, Sading, dan Lukluk.
 - Tukad Tegan, mengalir di Desa Lukluk, Darmasaba, dan Penarungan.
11. Tukad Buluh, sebagai anak sungai Tukad Singapadu, mengalir di Desa Angantaka dan Sedang. Tukad Buluh mempunyai satu anak sungai sebagai orber 3, yaitu:
- Tukad Batangbuah, mengalir di Desa Sedang dan Mekar Bhuana.

2) Mata Air

Berdasarkan JICA (2006), di Provinsi Bali terdapat 1.273 buah mata air dan menurut Dinas PU Provinsi Bali (2011) mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya sebanyak 570 buah. Mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya di Kabupaten Badung berjumlah 21 buah dengan debit air total 501,90 liter/detik atau 15,83 juta m³ pertahun.

Sumber daya air yang bersumber dari mata air dimanfaatkan sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk pengairan atau irigasi pertanian (sawah). Pemanfaatan air mata air untuk irigasi pertanian di Kabupaten Badung.

Tabel 2.11.
Mata Air dan Luas Area yang Dialiri di Kabupaten Badung

No	Nama Mata Air	Luas Area yang Dialiri (Ha)
1	MA Penataran I dan II	109,00
2	MA Sulangai	-
3	MA Belong	37,32
4	MA Dungus	15,21
5	MA Mumbul	-
6	MA Sangeh	17,14
7	MA Blahkiuh	13,81
8	MA Uma Poh	22,02
9	MA Apuan	67,83
10	MA Taman I	86,62
11	MA Taman II	52,16
12	MA Pacung I	97,93
13	MA Pacung II	10,80
14	MA Sudamala	-
15	MA Gangga	126,66
16	MA Dukun	47,37
17	MA Sagu	15,87
18	MA Bukti	88,76
19	MA Batan Badung	90,97
20	MA Guming	37,38
21	MA Panggul	17,83

Sumber: Dinas PU Provinsi Bali (2011)

3) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Aliran air tanah dimulai pada daerah resapan air tanah atau sering juga disebut sebagai daerah imbuhan air tanah (*recharge zone*). Daerah ini adalah wilayah air yang berada di permukaan tanah baik air hujan ataupun air permukaan mengalami proses penyusupan (infiltrasi) secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan. Proses penyusupan ini akan berakumulasi pada satu titik, air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang bersifat kedap air (*impermeabel*). Titik akumulasi ini akan membentuk suatu zona jenuh air (*saturated zone*) yang seringkali disebut sebagai daerah luhan air tanah (*discharge zone*). Perbedaan kondisi fisik secara alami akan mengakibatkan air dalam zonasi ini akan bergerak/mengalir baik secara gravitasi, perbedaan tekanan, kontrol struktur batuan dan parameter lainnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai aliran air tanah. Daerah aliran air tanah ini selanjutnya disebut sebagai daerah aliran (*flow zone*).

Dalam perjalanannya aliran air tanah ini seringkali melewati suatu lapisan akuifer yang di atasnya memiliki lapisan penutup yang bersifat kedap air (*impermeable*) hal ini mengakibatkan perubahan tekanan antara air tanah yang berada di bawah lapisan penutup dan air tanah yang berada di atasnya. Perubahan tekanan inilah yang didefinisikan sebagai air tanah tertekan (*confined aquifer*) dan air tanah bebas (*unconfined aquifer*). Dalam kehidupan sehari-hari pola pemanfaatan air tanah bebas sering dalam bentuk penggunaan sumur gali oleh penduduk, sedangkan air tanah tertekan dalam sumur bor yang sebelumnya telah menembus lapisan penutupnya.

Air tanah bebas (*water table*) memiliki karakter berfluktuasi terhadap iklim sekitar, mudah tercemar dan cenderung memiliki kesamaan karakter kimia dengan air hujan. Kemudahannya untuk didapatkan membuat kecenderungan disebut sebagai air tanah dangkal. Sedangkan air tanah tertekan/air tanah terhalang seringkali disebut sebagai air sumur artesis (*artesian well*). Pola pergerakannya yang menghasilkan gradient potensial, mengakibatkan adanya istilah artesis positif; kejadian potensial air tanah ini berada di atas permukaan tanah sehingga air tanah akan mengalir vertikal secara alami menuju kesetimbangan garis potensial khayal ini. Artesis nol; kejadian garis potensial khayal ini sama dengan permukaan tanah sehingga muka air tanah akan sama dengan muka tanah. Terakhir artesis negatif; kejadian garis potensial khayal ini di bawah permukaan tanah sehingga muka air tanah akan berada di bawah permukaan tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi *dkk.*, 1986), terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis) di wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut:

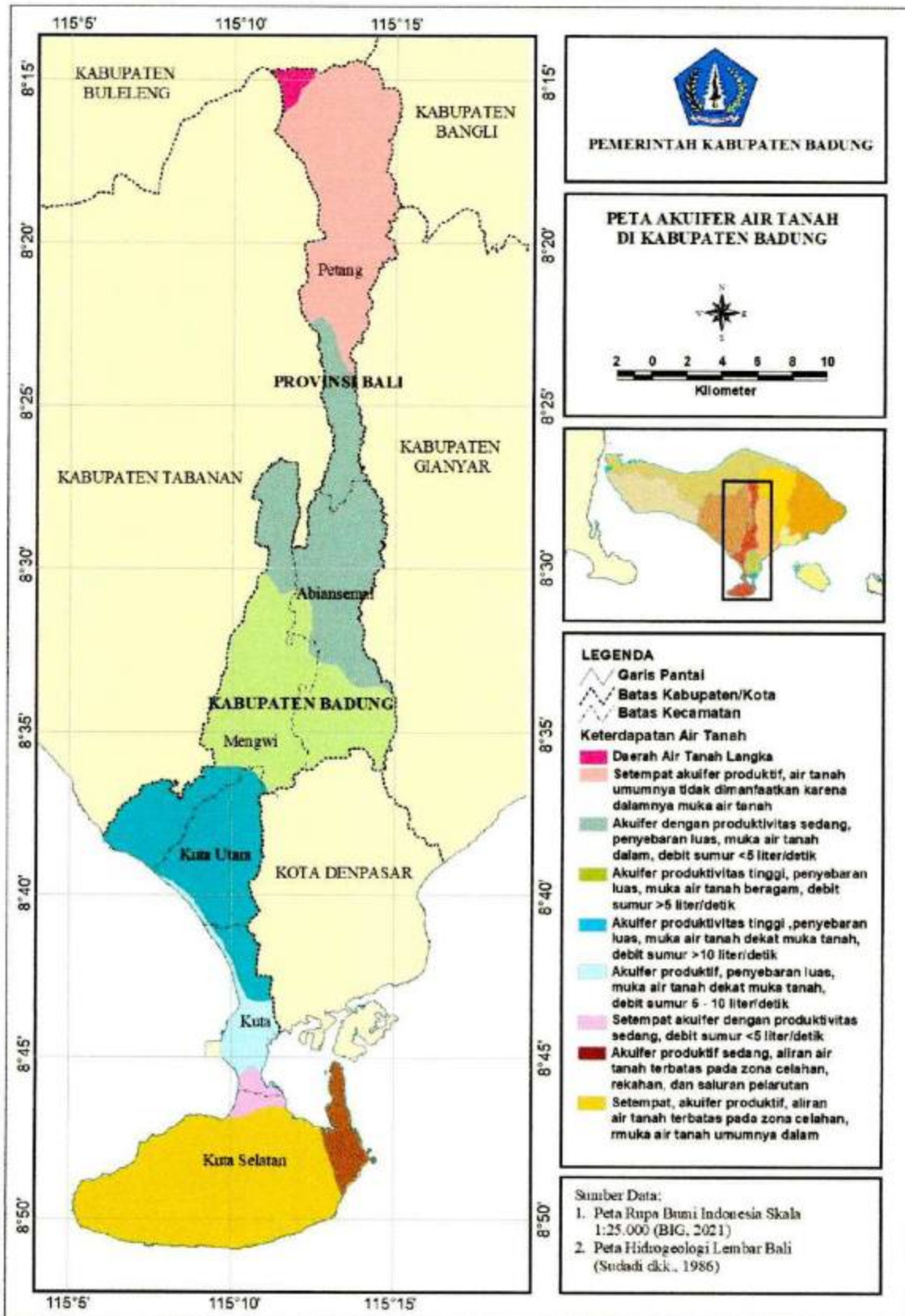
- Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya >10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi.

- Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kecamatan Mengwi dan Abiansemal.
- Akuifer produktivitas sedang, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Petang.
- Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Terdapat di Kecamatan Patang.
- Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di Kelurahan Kuta, Tuban, dan daerah pantai Legian, Seminyak, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu.
- Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di Kelurahan Tuban dan Jimbaran.
- Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik.
- Terdapat di daerah dataran rendah Kelurahan Benoa dan Tanjung Benoa.
- Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Kuta Selatan.

Menurut Badan Geologi (2008), potensi air tanah di wilayah Kabupaten Badung tersebar dalam dua Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Denpasar-Tabanan dan CAT Nusa Dua. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Secara umum air tanah akan mengalir sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran antar batuan.

Cekungan Air Tanah Denpasar-Tabanan merupakan CAT lintas kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem, dengan potensi air terbesar di Bali. Di wilayah Kabupaten Badung, CAT Denpasar-Tabanan tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Kuta Selatan. Sedangkan CAT Nusa Dua tersebar di kawasan Bukit, Kecamatan Kuta Selatan. Luas CAT Denpasar-Tabanan adalah 2.080 km² dengan potensi air tanah bebas 894 juta m³/tahun dan air tanah tertekan 8 juta m³/tahun. Sementara itu, luas CAT Nusa Dua adalah 99 km², dengan potensi air tanah bebas 38 juta m³/tahun dan tidak terdapat potensi air tanah tertekan.

Gambar 2.18.
Peta Aquifer Air Tanah di Kabupaten Badung



I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri atas 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO₂, dan SO₂. (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut. (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Secara keseluruhan, IKLH Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Berdasarkan data perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, IKLH Kabupaten Badung mencapai angka 69,18, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 70,08 dan terus naik pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di 70,85. Namun, setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan nilai 68,37, dan tren menurun berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan nilai masing-masing 67,12 dan 69,06.

Jika dilihat dari indikator-indikatornya, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama dari 49,33 di tahun 2018 menjadi 53,33 pada tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada 2023 dengan angka 52,86. Indeks Kualitas Udara, yang semula sangat tinggi di angka 99,16 pada 2018, menunjukkan fluktuasi dengan mencapai puncak pada 2020 di 94,07, tetapi turun menjadi 91,28 pada 2023. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan penurunan yang lebih tajam, dari 61,63 pada 2018 hingga terendah di 29,46 pada 2021, namun mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 55,79 pada 2023.

Tabel 2.12.

Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2022

IKLH dan Indikatornya	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH Provinsi Bali	66,62	63,09	71,99	70,70	70,89	71,38
Indeks Kualitas Air	48,50	65,33	64,33	54,29	53,50	55,17
Indeks Kualitas Udara	88,97	89,85	88,34	89,28	89,19	88,99

IKLH dan Indikatornya	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air Laut		52,65	69,75	85,14	88,49	86,05
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,56	41,34	40,59	42,11	43,36	45,22
IKLH Kabupaten Badung	69,18	70,08	70,85	68,37	67,12	69,06
Indeks Kualitas Air	49,33	50,00	49,33	63,33	53,33	52,86
Indeks Kualitas Udara	99,16	102,74	92,79	94,07	91,69	91,28
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,63	61,53	70,52	29,46	45,36	55,79

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

J. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

1) Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan untuk permukiman merupakan kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk serta dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung lahan sangat penting dalam perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang karena dapat memperkirakan apakah ketersediaan lahan di wilayah tersebut mampu menampung kebutuhan lahan untuk permukiman hingga tahun perencanaan. Analisis daya dukung lahan untuk permukiman menggunakan konsep ketersediaan – kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Badung mencakup total luas sebesar 28.135,16 hektar. Lahan ini terdiri dari lahan permukiman yang sudah ada serta lahan yang berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Berdasarkan asumsi bahwa setiap penduduk memerlukan ruang seluas 100 meter persegi (0,01 hektar) untuk melakukan berbagai aktivitasnya, dan dengan asumsi bahwa setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007, lahan seluas ini memiliki kapasitas untuk menampung hingga 2.813.516 jiwa.

Jumlah penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 503.592 jiwa. Proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk akan meningkat menjadi 839.482 jiwa. Dengan ketersediaan lahan saat ini, terdapat surplus lahan yang signifikan. Pada tahun 2023, surplus lahan dapat menampung tambahan 2.307.901 jiwa, sementara pada tahun 2045, surplus lahan tetap cukup untuk menampung tambahan 1.971.991 jiwa. Surplus lahan ini diperuntukkan khusus untuk permukiman dan tidak termasuk lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian atau penggunaan lainnya. Status daya dukung lahan untuk permukiman di semua kecamatan pada tahun 2023 sampai 2045 masih surplus. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2023, terdapat satu desa/kelurahan yang mengalami defisit lahan, yaitu Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta. Hal tersebut menunjukkan bahwa surplus tersebut tidak merata di seluruh wilayah kabupaten. Defisit di Kelurahan Tuban mengindikasikan adanya kesenjangan dalam distribusi lahan permukiman. Dengan demikian, meskipun daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Badung dapat disebut surplus, kesenjangan distribusi lahan antar wilayah tetap memerlukan perhatian khusus.

Tabel 2.13.
Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Badung

No.	Variabel	Eksisting (Tahun 2023)	Estimasi (Tahun 2045)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan lahan permukiman (a)	28.135,16 ha	28.135,16 ha
2	Jumlah penduduk (b)	503.592 orang	839.482 orang
	Daya tampung penduduk (a x 100)	2.813.516 orang	2.813.516 orang
3	Asumsi ruang untuk aktivitas	100 m ² /orang	100 m ² /orang
4	Asumsi penghuni per rumah	5 orang/rumah	5 orang/rumah
Surplus lahan (b-a)		2.307.901 orang	1.971.991 orang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Badung

Tabel 2.14.

Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Masing-Masing Desa di Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)		Selisih Daya Tampung Penduduk (jiwa)		Status Daya Dukung Lahan Permukiman	
				2023	2043	2023	2043	2023	2043
A	Kecamatan Abiansemal	4896,83	489.683	97.710	162.881	391.973	326.801	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	265,42	26.542	8.018	13.366	18.524	13.176	Surplus	Surplus
2	Angantaka	216,4	21.640	4.140	6.901	17.500	14.739	Surplus	Surplus
3	Ayunan	164,73	16.473	2.516	4.194	13.957	12.279	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	415,96	41.596	6.320	10.535	35.276	31.060	Surplus	Surplus
5	Bongkasa	268,27	26.827	6.276	10.462	20.551	16.365	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	201,17	20.117	2.633	4.389	17.479	15.723	Surplus	Surplus
7	Darmasaba	416,61	41.661	10.675	17.795	30.986	23.866	Surplus	Surplus
8	Dauh Yehi Cari	213,44	21.344	6.328	10.549	15.036	10.795	Surplus	Surplus
9	Jagapati	158,82	15.882	4.029	6.716	11.853	9.166	Surplus	Surplus
10	Mambal	223,1	22.310	5.353	8.923	16.957	13.387	Surplus	Surplus
11	Mekar Bhuwana	145,27	14.527	5.193	8.657	9.334	5.870	Surplus	Surplus
12	Punggul	180,51	18.051	3.305	5.509	14.746	12.541	Surplus	Surplus
13	Sangeh	257,65	25.765	4.776	7.962	20.989	17.804	Surplus	Surplus
14	Sedang	346,62	34.662	4.404	7.341	30.258	27.320	Surplus	Surplus
15	Setat	121,1	12.110	2.458	4.097	9.652	8.013	Surplus	Surplus
16	Sibang Gede	514,07	51.407	7.441	12.404	43.966	39.003	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	296,89	29.689	6.836	11.396	22.853	18.293	Surplus	Surplus
18	Taman	490,84	49.084	7.009	11.684	42.075	37.400	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	953,86	95.386	50.678	84.480	44.708	10.907	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	123,56	12.356	7.364	12.276	4.992	-120	Surplus	Defisit
2	Kuta	322,47	32.247	17.643	29.411	14.604	2.836	Surplus	Surplus
3	Legian	129,1	12.910	5.372	8.955	7.538	3.955	Surplus	Surplus
4	Seminyak	290,76	29.076	3.870	6.451	25.206	22.624	Surplus	Surplus
5	Tuban	89,99	8.999	16.429	27.387	-7.430	-18.388	Defisit	Defisit
C	Kecamatan Kuta Selatan	6391,1	639.109,53	115.020	191.737	524.090	447.372	Surplus	Surplus
1	Benoa	1184,01	118.401	32.759	54.609	85.642	63.792	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	1428,1	142.810	49.119	81.881	93.691	60.929	Surplus	Surplus
3	Kutuh	893,03	89.303	5.257	8.763	64.046	60.540	Surplus	Surplus
4	Pecatu	1843,74	184.374	8.235	13.728	176.139	170.646	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	96,19	9.619	5.815	9.694	3.804	-75	Surplus	Defisit
6	Ungasan	1146,02	114.602	13.835	23.063	100.767	91.540	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	2660,17	266.017	80.174	133.649	185.843	132.368	Surplus	Surplus
1	Canggu	423,83	42.383	6.976	11.629	35.405	30.752	Surplus	Surplus
2	Dalung	511,48	51.148	23.109	38.522	28.039	12.626	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	325,82	32.582	10.062	16.773	22.520	15.809	Surplus	Surplus
4	Kerobokan Kaja	343,3	34.330	17.408	29.019	16.922	5.311	Surplus	Surplus
5	Kerobokan Kelod	619,99	61.999	10.768	17.950	51.231	44.049	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	435,77	43.577	11.851	19.755	31.726	23.821	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	6233,23	623.323	127.389	212.356	495.934	410.967	Surplus	Surplus
1	Abianbase	268,01	26.801	7.022	11.706	19.779	15.096	Surplus	Surplus
2	Baha	507,96	50.796	3.950	6.585	46.846	44.211	Surplus	Surplus
3	Buduk	262,64	26.264	8.553	14.258	17.711	12.006	Surplus	Surplus
4	Cemagi	415,78	41.578	5.271	8.787	36.307	32.791	Surplus	Surplus
5	Gulingan	443,79	44.379	8.450	14.086	35.929	30.292	Surplus	Surplus
6	Kapal	457,65	45.765	11.639	19.402	34.126	26.363	Surplus	Surplus
7	Kekeran	373,77	37.377	3.837	6.396	33.540	30.881	Surplus	Surplus
8	Kuwum	148,73	14.873	3.134	5.224	11.739	9.649	Surplus	Surplus
9	Lukluk	372,25	37.225	8.025	13.378	29.200	23.847	Surplus	Surplus
10	Mengwi	184,22	18.422	8.087	13.481	10.335	4.941	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	280,03	28.003	7.941	13.238	18.062	12.766	Surplus	Surplus
12	Munggu	510,6	51.060	7.255	12.094	43.805	38.966	Surplus	Surplus
13	Penarungan	388,62	38.862	7.126	11.879	31.736	26.983	Surplus	Surplus
14	Prereman	292,14	29.214	3.268	5.448	25.946	23.767	Surplus	Surplus
15	Sading	211,25	21.125	8.293	13.824	12.832	7.301	Surplus	Surplus
16	Sembung	352,15	35.215	5.895	9.827	29.320	25.388	Surplus	Surplus
17	Semplidi	218,64	21.864	6.916	11.529	14.948	10.335	Surplus	Surplus
18	Sobangan	220,92	22.092	3.942	6.571	18.150	15.521	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	157,92	15.792	3.423	5.706	12.369	10.086	Surplus	Surplus
20	Wendi Bhuwana	186,17	18.617	5.362	8.938	13.255	9.678	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	6999,96	699.996	32.621	54.379	667.375	645.618	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	2162,95	216.295	5.587	9.313	210.708	206.982	Surplus	Surplus
2	Carangsari	529,77	52.977	6.011	10.020	46.966	42.956	Surplus	Surplus
3	Getasan	200,26	20.026	2.180	3.614	17.846	16.392	Surplus	Surplus
4	Pangsan	349,48	34.948	2.920	4.868	32.028	30.081	Surplus	Surplus
5	Pelaga	2205,2	220.520	6.649	11.084	213.871	209.436	Surplus	Surplus
6	Petang	703,65	70.365	4.435	7.393	65.930	62.972	Surplus	Surplus
7	Sulangai	848,66	84.866	4.839	8.067	80.027	76.799	Surplus	Surplus
	TOTAL	28135,16	2.813.516	505.615	841.525	2.311.947	1.976.077	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung


2) Daya Dukung Air

Daya dukung air ditentukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan metode koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sedangkan kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Berdasarkan metode tersebut dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Daya dukung air surplus apabila nilai ketersediaan lebih besar daripada nilai kebutuhan dan daya dukung air defisit apabila ketersediaan air lebih kecil dibandingkan kebutuhan air.

Daya dukung air suatu wilayah adalah “perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air” di wilayah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penentuan daya dukung air adalah metode koefisien limpasan yang berdasarkan atas data penggunaan lahan, dan data curah hujan tahunan. Sementara kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak penduduk akan air yang ditentukan oleh besarnya populasi manusia di suatu wilayah. Merujuk Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang telah memberikan suatu angka konstanta tentang tingkat konsumsi air yang berasal dari tingkat konsumsi air kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan buah yang disetarakan dengan kebutuhan air dan juga dari pemanfaatan air virtual untuk menghasilkan satu satuan produk.

Ketersediaan (*supply*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan besaran cadangan air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Ketersediaan air bersumber dari air permukaan dan air bawah tanah yang pada prinsipnya semua berasal dari air hujan. Tingkat ketersediaan air pada suatu wilayah, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu; curah hujan, koefisien limpasan tertimbang, dan luas wilayah. Sedangkan kebutuhan (*demand*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan suatu gambaran besarnya kebutuhan air untuk keperluan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil analisis data koefisien limpasan, luas wilayah, dan curah hujan diketahui ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 503.592 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 839.482 jiwa maka kebutuhan air di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebesar 22.057.330 m³/tahun dan tahun 2043 sebesar 36.769.317 m³/tahun. Dengan demikian status daya dukung air pada tahun 2023 adalah surplus. Status daya dukung air sampai tahun 2043 masih surplus. Jika dirinci menurut kecamatan, status daya dukung air di semua kecamatan sampai tahun 2043 masih surplus. Namun jika dirinci menurut desa/kelurahan, terdapat dua desa yang telah defisit daya dukung air pada tahun 2023 yaitu Desa Blahkiuh dan Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan Abiansemal. Sedangkan pada tahun 2043 terdapat 15 desa yang defisit daya dukung air, tersebar di Kecamatan Abiansemal 8 desa, Kuta Utara 2 desa, dan Kecamatan Mengwi 5 desa.



Meskipun Kabupaten Badung secara keseluruhan memiliki surplus daya dukung air hingga tahun 2043, ketidakmerataan distribusi air di antara desa-desa menunjukkan adanya desa-desa yang mengalami defisit air, seperti Desa Blahkiuh dan Desa Mekar Bhuwana pada tahun 2023, serta 15 desa lainnya pada tahun 2043. Akumulasi surplus air dari desa-desa yang memiliki kelebihan air dapat mengakomodasi desa-desa yang mengalami defisit, dengan menyediakan infrastruktur dan sistem distribusi yang memadai. Selain itu, manajemen sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk perencanaan dan regulasi yang efektif, sangat penting untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan adil. Dengan investasi dan perencanaan yang tepat, surplus air dari desa-desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang mengalami kekurangan, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial di seluruh Kabupaten Badung.

Tabel 2.15.
Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Air	Penduduk (Jiwa)		Kebutuhan Air (M3/Tahun)		Status Daya Dukung Air	
			2023	2043	2023	2043	2023	2043
A	Kecamatan Abiansemal	8.160.877	97.710	162.881	4.279.698	7.134.208	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	389.876	8.018	13.366	351.188	585.427	Surplus	Defisit
2	Angantaka	313.519	4.140	6.901	181.332	462.033	Surplus	Defisit
3	Ayunan	317.879	2.516	4.194	110.201	302.278	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	241.975	6.320	10.535	276.816	183.703	Defisit	Surplus
5	Bongkasa	611.006	6.276	10.462	274.889	461.449	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	394.063	2.633	4.389	115.325	458.237	Surplus	Defisit
7	Darmasaba	492.594	10.675	17.795	467.565	192.246	Surplus	Surplus
8	Dauh Yeh Cani	611.970	6.328	10.549	277.166	779.426	Surplus	Defisit
9	Jagapati	233.296	4.029	6.716	176.470	294.174	Surplus	Defisit
10	Mambal	327.719	5.353	8.923	234.461	390.844	Surplus	Defisit
11	Mekar Bhuwana	213.390	5.193	8.657	227.453	379.162	Defisit	Defisit
12	Punggul	265.152	3.305	5.509	144.759	241.312	Surplus	Surplus
13	Sangeh	633.667	4.776	7.962	209.189	348.715	Surplus	Surplus
14	Sedang	509.151	4.404	7.341	192.895	321.554	Surplus	Surplus
15	Selat	177.891	2.458	4.097	107.660	179.469	Surplus	Defisit
16	Sibang Gede	755.122	7.441	12.404	325.916	543.298	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	951.609	6.836	11.396	299.417	499.124	Surplus	Surplus
18	Taman	720.997	7.009	11.684	306.994	511.756	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	12.744.497	50.678	84.480	2.219.696	3.700.209	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	1.083.108	7.364	12.276	322.543	537.676	Surplus	Surplus
2	Kuta	4.661.543	17.643	29.411	772.763	1.288.188	Surplus	Surplus
3	Legian	1.277.999	5.372	8.955	235.294	392.232	Surplus	Surplus
4	Seminyak	2.457.446	3.870	6.451	169.506	282.565	Surplus	Surplus
5	Tuban	3.264.401	16.429	27.387	719.590	1.199.549	Surplus	Surplus
C	Kecamatan Kuta Selatan	60.291.364	115.020	191.737	5.037.876	8.398.082	Surplus	Surplus
1	Benoa	15.527.104	32.759	54.609	1.434.844	2.391.869	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	16.891.201	49.119	81.881	2.151.412	3.586.380	Surplus	Surplus
3	Kutuh	4.033.830	5.257	8.763	230.257	383.835	Surplus	Surplus
4	Pecatu	16.234.832	8.235	13.728	360.693	601.271	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	431.866	5.815	9.694	254.697	424.577	Surplus	Surplus
6	Ungasan	7.172.531	13.835	23.063	605.973	1.010.150	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	13.583.238	80.174	133.649	3.511.621	5.853.833	Surplus	Surplus
1	Canggu	2.480.497	6.976	11.629	305.549	509.346	Surplus	Surplus
2	Dalung	2.556.257	23.109	38.522	1.012.174	1.687.283	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	478.603	10.062	16.773	440.716	734.668	Surplus	Defisit
4	Kerobokan Kaja	1.064.012	17.408	29.019	762.470	1.271.029	Surplus	Defisit
5	Kerobokan Kelod	4.306.691	10.768	17.950	471.638	786.216	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	2.697.178	11.851	19.755	519.074	865.290	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	15.416.091	127.389	212.356	5.579.638	9.301.193	Surplus	Surplus
1	Abianbase	798.989	7.022	11.706	307.564	512.705	Surplus	Surplus
2	Baha	746.146	3.950	6.585	173.010	288.406	Surplus	Surplus
3	Buduk	385.797	8.553	14.258	374.621	624.490	Surplus	Defisit
4	Cemagi	1.800.364	5.271	8.787	230.870	384.857	Surplus	Surplus
5	Gulingan	1.085.323	8.450	14.086	370.110	616.969	Surplus	Surplus
6	Kapal	672.255	11.639	19.402	509.788	849.811	Surplus	Defisit
7	Kekeran	549.033	3.837	6.396	168.061	280.155	Surplus	Surplus
8	KuwuM	446.135	3.134	5.224	137.269	228.826	Surplus	Surplus
9	Lukluk	546.796	8.025	13.378	351.495	585.938	Surplus	Defisit
10	Mengwi	785.228	8.087	13.483	354.211	590.465	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	1.259.859	7.941	13.238	347.816	579.805	Surplus	Surplus
12	Munggu	1.217.707	7.255	12.094	317.769	529.717	Surplus	Surplus
13	Penarungan	570.848	7.126	11.879	312.119	520.298	Surplus	Surplus
14	Pererenan	703.023	3.268	5.448	143.138	238.610	Surplus	Surplus
15	Sading	310.310	8.293	13.824	363.233	605.506	Surplus	Defisit
16	Sembung	1.051.044	5.895	9.827	258.201	430.418	Surplus	Surplus
17	Sempidi	654.874	6.916	11.529	302.921	504.966	Surplus	Surplus
18	Sobangan	1.045.097	3.942	6.571	172.660	287.822	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	231.968	3.423	5.706	149.927	249.927	Surplus	Defisit
20	Wardi Bhuwana	555.294	5.362	8.938	234.856	391.502	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	23.951.251	32.621	54.379	1.428.800	2.381.793	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	8.059.373	5.587	9.313	244.711	407.930	Surplus	Surplus
2	Carangsari	1.580.932	6.011	10.020	263.282	438.888	Surplus	Surplus
3	Getasan	597.943	2.180	3.634	95.484	159.171	Surplus	Surplus
4	Pangsari	1.042.382	2.920	4.868	127.896	213.201	Surplus	Surplus
5	Pelaga	10.390.425	6.649	11.084	291.226	485.471	Surplus	Surplus
6	Petang	1.033.596	4.435	7.393	194.253	323.818	Surplus	Surplus
7	Sulangai	1.246.601	4.839	8.067	211.948	353.315	Surplus	Surplus
	TOTAL	134.147.319	505.615	841.525	22.059.353	36.771.360	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPIPD Kabupaten Badung

3) Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Kabupaten Badung

Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan: Penghitungan ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun; Ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan dan air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas; dan Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air, periode 1996 sampai dengan 2020.

1. Ketersediaan Air

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, jumlah ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m³/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 – 491.070.463,68 m³/tahun. Ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun atau 6,08% dari total ketersediaan air di Bali.

2. Kebutuhan Air

Jumlah kebutuhan air di Provinsi Bali yaitu 4.061.324.302,72 m³/tahun, terdiri atas kebutuhan air domestik sebanyak 373.035.456,00 m³/tahun (9,19%) dan kebutuhan lahan untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan sebanyak 3.688.288.846,72 m³/tahun (90,81%). Kebutuhan air menurut kabupaten/kota berkisar 103.142.016,67 – 834.623.841,58 m³/tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Badung adalah 382.229.377,95 m³/tahun atau 9,41% dari total kebutuhan air di Bali. Kebutuhan air untuk domestik sebanyak 47.361.368,60 m³/tahun atau 12,70% dari total kebutuhan air domestik di Bali. Sedangkan kebutuhan air untuk untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan sebanyak 334.868.008,35 m³/tahun atau 9,08% dari total kebutuhan air untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan di Bali.

3. Indikasi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Badung sebagian besar wilayahnya telah "Terlampau" yaitu mencapai 93,10% dari total luas wilayah sedangkan wilayah yang "Belum Terlampau" sebesar 6,90%. Jumlah defisit air di Kabupaten Badung mencapai (-)255.912.874,36 m³/tahun atau 202,60% dari sediaan air sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun.

Tabel 2.16.

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)			Status	Terlampai	Belum Terlampai
			Domestik	Lahan	Jumlah			
1	Jembrana	324.464.970,07	27.396.230,40	405.193.489,70	432.589.720,10	Terlampai	49.194,72	35.841,97
2	Tabanan	391.015.984,65	39.881.203,20	794.742.638,38	834.623.841,58	Terlampai	72.916,14	11.845,07
3	Badung	126.316.503,59	47.361.369,60	334.868.008,35	382.229.377,95	Terlampai	37.715,98	2.797,44
4	Gianyar	124.233.000,84	44.525.203,20	427.216.531,65	471.741.734,85	Terlampai	36.628,03	5,34
5	Klungkung	142.389.489,81	17.880.566,40	211.093.343,57	228.973.909,97	Terlampai	24.824,61	6.397,42
6	Bangli	165.502.462,10	22.351.852,80	314.739.002,03	337.090.854,83	Terlampai	44.504,46	8.292,81
7	Karangasen	279.034.775,64	42.544.828,80	482.221.332,80	524.766.161,60	Terlampai	69.120,74	14.649,47
8	Buleleng	491.070.463,68	68.427.331,20	677.739.353,97	746.166.685,17	Terlampai	86.403,83	45.674,55
9	Denpasar	34.779.742,42	62.666.870,40	40.475.146,27	103.142.016,67	Terlampai	11.650,43	713,36
	Bali	2.078.807.392,80	373.035.456,00	3.688.288.846,72	4.061.324.302,72	Terlampai	432.958,95	126.217,43

Sumber : Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Bali Skala 1:250.000 (KLHK, 2023)

Tabel 2.17.

Defisit Air di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Defisit Air	
				Jumlah (M3/Tahun)	Persentase (%)
.1	Jembrana	324.464.970,07	432.589.720,10	-108.124.750,03	-33,32
.2	Tabanan	391.015.984,65	834.623.841,58	-443.607.856,92	-113,45
3	Badung	126.316.503,59	382.229.377,95	-255.912.874,36	-202,6
.4	Gianyar	124.233.000,84	471.741.734,85	-347.508.734,01	-279,72
.5	Klungkung	142.389.489,81	228.973.909,97	-86.584.420,17	-60,81
.6	Bangli	165.502.462,10	337.090.854,83	-171.588.392,72	-103,68
.7	Karangasen	279.034.775,64	524.766.161,60	-245.731.385,96	-88,06
.8	Buleleng	491.070.463,68	746.166.685,17	-255.096.221,49	-51,95
.9	Denpasar	34.779.742,42	103.142.016,67	-68.362.274,25	-196,56
	Bali	2.078.807.392,80	4.061.324.302,72	-1.982.516.909,92	-95,37

K. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Badung sebagai bagian dari Pulau Bali rentan akan adanya bencana alam, karena kedudukan Pulau Bali pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Dilihat dari potensi bencana yang ada, beberapa bencana yang berpotensi menimpa Kabupaten Badung antara lain: Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Bencana Tsunami, Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai, dan Kawasan Rawan Bencana Intrusi Air Laut.

Terkait dengan potensi bencana tersebut, BNPB mengeluarkan indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur risiko bencana di tiap-tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikator ini adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB di Kabupaten Badung pada tahun 2023 menurut data dari BNPB (melalui situs Inarisk) adalah 102,92, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan IRB 103,29. Pada tahun 2015 yang merupakan tahun awal IRB, IRB di Kabupaten Badung adalah 179,20. IRB Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Hal ini memberikan makna

bahwa risiko bencana di Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Bali. Risiko Bencana ini bukan hanya dilihat pada faktor alam semata namun juga bagaimana kemampuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung dalam memitigasi bencana. Sehingga dalam konteks penanggulangan bencana, Kabupaten Badung merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Bali.

Tabel 2.18.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab Jembrana	168,18	160,41	152,62	157,92	150,15
2	Kab Tabanan	160,22	153,27	153,27	143,87	136,90
3	Kab Buleleng	107,35	102,05	92,45	92,64	91,49
4	Kab Gianyar	136,09	129,79	129,79	130,56	129,03
5	Kab Klungkung	145,92	133,42	124,22	125,41	126,93
6	Kab Bangli	144,18	139,46	133,69	128,65	125,04
7	Kab Karangasem	137,94	137,94	123,15	129,11	121,24
8	Kab Badung	106,93	101,81	101,81	103,29	102,92
9	Kota Denpasar	107,98	106,70	106,70	104,39	98,18

Sumber: INARisk BNPB melalui situs <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> yang diakses tahun 2024

L. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro, meso, dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP berdasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan

3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan terdapat sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, berikut adalah indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP.

Berdasarkan data dari Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023, indeks ketahanan pangan (IKP) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali bervariasi. Kabupaten Denpasar memiliki nilai IKP tertinggi dengan 95,80, diikuti oleh Gianyar dengan 92,16. Kabupaten Badung berada di peringkat ketiga dengan nilai IKP 91,59. Kabupaten Badung, dengan nilai IKP 91,59, menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam aspek ketahanan pangan. Nilai ini menempatkan Badung di posisi ketiga setelah Denpasar dan Gianyar. Tingginya nilai IKP di Kabupaten Badung menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan keberhasilan berbagai program yang dijalankan untuk mendukung sektor pertanian. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.19.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023

NO	Kabupaten	Indeks Ketahanan Pangan
1	Tabanan	90,54
2	Denpasar	95,80
3	Badung	91,59
4	Gianyar	92,16
5	Jembrana	86,59
6	Klungkung	87,53
7	Buleleng	82,02
8	Karangasem	85,28
9	Bangli	77,35

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023

2. Aspek Demografi

A. Jumlah, Sebaran, dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Badung berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 548.191 jiwa. Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dan terendah berada di Kecamatan Petang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung diperkirakan terus meningkat selama tahun 2020-2022. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Badung meningkat menjadi 549,50 ribu jiwa dimana

Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan masih memiliki jumlah penduduk tertinggi.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatan penduduknya, secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Badung adalah 1.310 Jiwa/Km². Kecamatan Kuta merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.377 Jiwa/Km² sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Petang yaitu hanya 270 Jiwa/Km². Badung Selatan (Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan) memiliki kepadatan penduduk 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Badung Utara (Kecamatan Petang, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Abiansema). Ini mengindikasikan pertumbuhan di kedua wilayah tersebut tidak seimbang dimana Badung Selatan mengalami konsentrasi pembangunan dan perkembangan yang lebih pekat dibandingkan Badung Utara. Untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka dibutuhkan pemerataan pembangunan sekaligus pengendalian yang ketat untuk menjaga agar kualitas lingkungan Kabupaten Badung dapat terjaga dan tidak mengalami penurunan kembali.

Tabel 2.20.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung 2020-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (ribu jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kuta Selatan	101,13	131.139	1.297	131,40	1.299	131,40	1.299	118,10	1.167,80
2	Kuta	17,52	59.160	3.377	59,30	3.383	59,30	3.385	56,80	3.242,01
3	Kuta Utara	33,86	95.189	2.811	95,40	2.817	95,40	2.817	87,80	2.593,03
4	Mengwi	82,00	132.786	1.619	133,10	1.623	133,20	1.624	131,60	1.604,88
5	Abiansema	69,01	98.904	1.433	99,10	1.436	99,10	1.436	98,90	1.433,13
6	Petang	115,00	31.013	270	31,10	270	31,10	270	32,80	285,22
	Jumlah	418,52	548.191	1.310	549,40	1.312	549,50	1.313	526,00	1.256,81

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Jumlah penduduk Kabupaten Badung menurut jenis kelamin tahun 2022 terdiri atas laki-laki sebanyak 275.168 jiwa dan perempuan sebanyak 274.359 orang, atau dengan rasio kelamin 100,3, artinya terdapat 1003 penduduk laki-laki untuk setiap 1000 penduduk perempuan.

Komposisi penduduk Kabupaten Badung menurut kelompok umur pada tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.19. Komposisi penduduk umur 20-24 tahun, umur 25-29 tahun, dan umur 45-49 tahun berada pada posisi puncak dengan jumlah 44,72 ribu hingga 45,35 ribu.